



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

# **LKIP 2019**

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**



**DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Jalan Pasteur No. 25 Telp. (022) 4232292-4236721**

**Tahun 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah, karunia dan bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87) adalah **“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**, merupakan seluruh upaya untuk megarahkan semua dimensi kebijakan pembangunan, baik di Kabupaten/Kota, lintas sektor, maupun lintas batas dan merupakan pedoman umum serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian perangkat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi pendorong, penggerak, fasilitator dan advokator untuk terjadinya akselerasi pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah

bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga Jawa Barat maju dan Sejahtera untuk Semua dapat segera tercapai.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai upaya kegiatan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun di provinsi. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam upaya mencapai indikator yang telah ditentukan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2023.

Hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dituangkan dalam laporan yang transparansi, akuntabel, demokratis, desentralisasi dan partisipatif, yaitu antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan sistem pelaporan yang penting dalam mendukung Tujuan Dinas Kesehatan, selain itu juga merupakan Sinergitas pembangunan kesehatan di era desentralisasi yang didukung dengan manajemen dan sistem pelaporan yang baik di berbagai tingkat administrasi. Laporan tersebut juga menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja masing-masing program di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang dilihat dengan cara membandingkan antara target dan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini kami ucapkan terima kasih semoga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diperoleh informasi dan gambaran penyelenggaraan program secara komprehensif, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, Amien....

Bandung, 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROPINSI JAWA BARAT,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19661020 199803 1003

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF		
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB. I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	4
	1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	8
BAB. II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	2.1 Perencanaan	13
	2.1.1. Rencana Strategik Tahun 2018 – 2013	13
	a. Tujuan Sasaran dan Strategi	15
	b. Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	15
	c. Strategi, Kebijakan dan Program	16
	2.1.2. Perencanaan Kinerja tahun 2019	22
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
	2.3 Program Kegiatan dan Anggaran	23
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	41
	3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	42
	A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik	42
	B. Akuntabilitas Keuangan	73
BAB. IV	PENUTUP	
	4.1 Simpulan Capaian Indikator	133
	4.2 Hambatan dan Permasalahan	135
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	138
LAMPIRAN		
	- Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	
	- Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Kedua indeks tersebut menunjukkan kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa. IPM dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri, diukur dalam indikator kinerja tujuan pembangunan berupa Indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun kinerja pelayanan dinas kesehatan provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yang mendukung terhadap tujuan tersebut ialah angka harapan hidup (AHH)

Permasalahan dan isu strategis daerah di provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam RPJMD provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 ialah masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, dimana kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di provinsi Jawa Barat masih belum optimal. diantaranya beberapa permasalahan bidang kesehatan antara lain : masih banyaknya jumlah kematian ibu dan bayi, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular, masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, masalah gizi masyarakat, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Pembangunan di Jawa Barat selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi

sehingga membutuhkan perencanaan dan penggerakkan sumber daya kesehatan yang lebih optimal

Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2018-2023 menetapkan IPM 73,74-74,35 point yang diproyeksikan dicapai pada tahun 2023 dan proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2023 sebesar 78,47-79,67 tahun. Dimana data awal pada tahun 2018 dari BPS adalah untuk IPM 71,30 point dan untuk AHH 72,66 Tahun.

Dalam menetapkan arah tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023 yaitu : **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Untuk menjalankan Visi tersebut diatas, ada 5 (lima) Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Misi Pertama : Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; Misi kedua : Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, bahagia dan produktif; Misi ketiga : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan; Misi keempat : Meningkatkan Produktivitas dan daya saing usaha Ekonomi umat yang sejahtera dan adil; Misi Kelima : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota. Dimana Misi Kedua yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, bahagia dan produktif, adalah merupakan bidang tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menjabarkan misi kedua tersebut dengan menentukan tujuan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023. Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018 – 2023 terdiri atas kebijakan pembangunan, program pembangunan, program janji gubernur dan kebijakan kewilayahan.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut maka kegiatan program Pembangunan Kesehatan wajib dilakukan oleh institusi pemerintah, swasta maupun perorangan. Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai sumber dana antara lain APBD, APBN dan PHLN yang perlu dipertanggungjawabkan melalui Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan ini dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan Unit Kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan

Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur. Berpedoman pada perundangan yang berlaku tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu upaya penerapan Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini merupakan wujud kewajiban mempertanggungjawaban kinerja pelaksanaan di Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode satu tahun kepada para pemangku kepentingan atas penggunaan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **1.2. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, tentang : Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 12 seri E, Tambahan lembaran daerah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E)
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri );

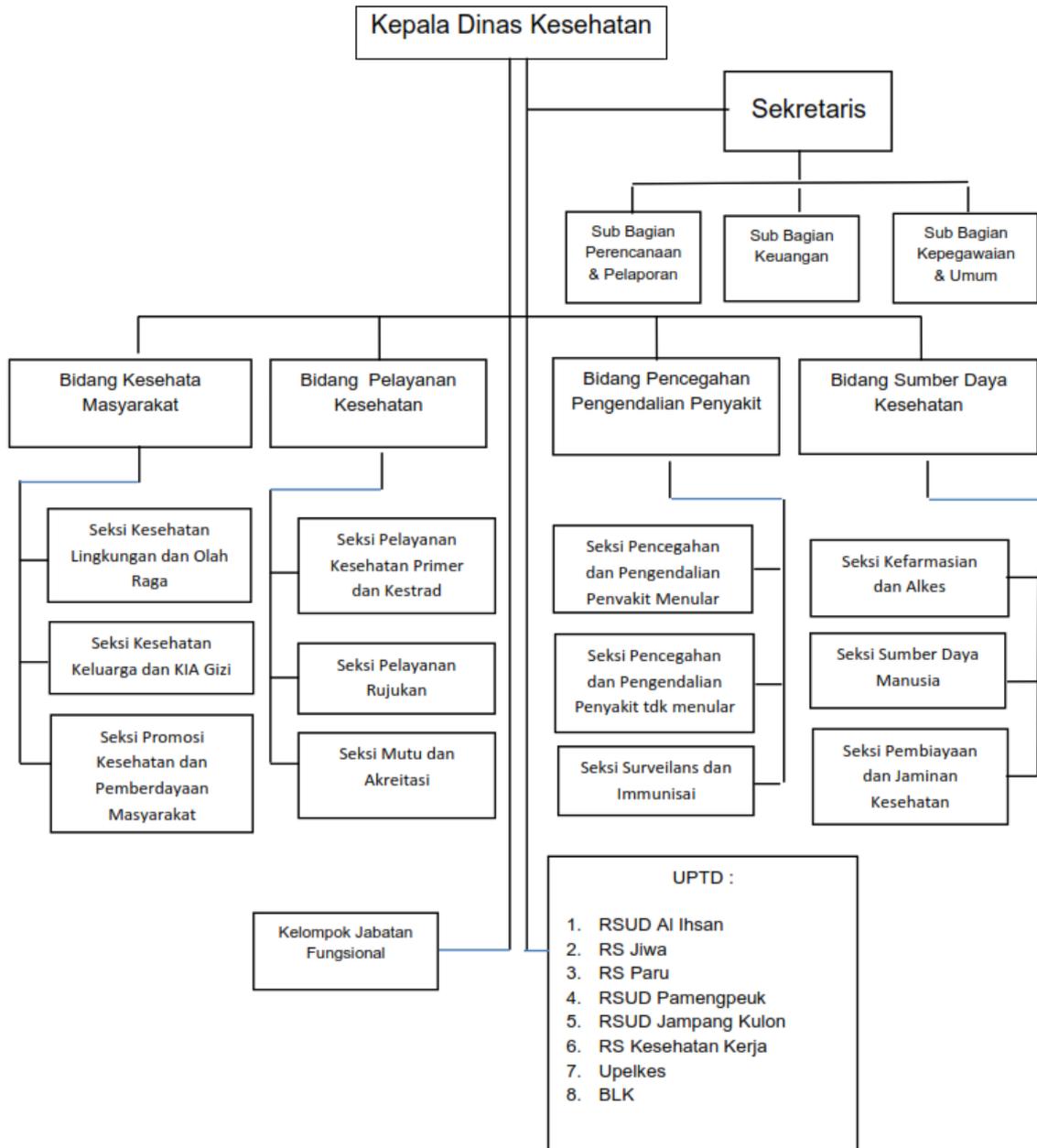
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban dan Palaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

### **1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas poko, Fungsi, Rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan, dimana menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten / Kota, dimana tipologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Tipe A yang

mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dengan truktur organisasi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

### 1.3.1 Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasidan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.2 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Rumah Sakit menjadi bagian UPTD Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya berdiri sebagai Perangkat daerah sendiri. Untuk itu sejak tahun 2017 Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Pameungpeuk dan Rumah Sakit Jampang Kulon menjadi UPTD Dinas Kesehatan selain 2 (dua) UPTD dinas kesehatan sebelumnya yaitu UPTD Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) dan UPTD Laboratorium Kesehatan (LABKES).

Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Pasteur no. 25 Bandung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran di Jl. Pasteur no. 25 dan 8 (delapan) UPTD, yaitu : Unit Pelatihan Kesehatan (Upelkes) Jl. Pasteur no. 31 Bandung, Balai Laboratorium Kesehatan ( BLK) Jl. Sederhana No 3 – 5 Bandung, RSUD Al Ihsan Jl. Ki Astramanggala, Baleendah, Bandung, RS Jiwa Provinsi Jl. Kolonel Masturi KM. 7 Cisarua Bandung Barat, RS Paru Provinsi Jawa Barat Jl. Pangeran Kejaksan Sidawangi Cirebon, RSUD Pamengpeuk Garut Jl. Raya Miramareu No. 99 Desa Sirna Bakti Kecamatan

Pamengpeuk Garut, RSUD Jampangkulon Jl. Cibarusah No.1 Jampang Kulon Sukabumi dan. RS Kesehatan Kerja Jl. Rancaekek Bandung Jl. Rancaekek Bandung,

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat seluruhnya 1218 orang, dengan uraian :

NO	UNIT	JUMLAH ASN			JUMLAH TOTAL
		STRUTURAL	FUNGSIONAL ANGKA KREDIT	FUNGSIONAL UMUM	
1.	Dinas Kesehatan	17	13	176	206
2.	RSUD Kesehatan Kerja	4	77	19	88
3.	UPELKES	4	12	18	34
4.	LABKES	4	39	14	57
5.	RS Al Ihsan	3	57	21	81
6.	RS Paru Sidawangi	13	140	82	235
7.	RS Jiwa	24	235	94	353
8.	RS Pameungpeuk	4	31	1	36
9.	RSUD Jampangkulon	11	70	47	128
		84	674	472	1218

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pegawai 204 orang terdiri dari :

1. Kepala Dinas (1 orang), Sekretaris (1 orang)
2. Sekretariat sebanyak 66 orang terdiri atas : Subbag Perencanaan dan pelaporan (11 orang ), Subbag Keuangan (25 orang ), Subbag Kepegawaian dan Umum (30 orang);
3. Bidang Kesehatan Masyarakat sebanyak 34 orang, terdiri atas : 1 orang Kepala Bidang, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (14 orang ), Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (9 orang), Seksi Kesehatan Lingkungan (10 orang);
4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebanyak 31 orang, terdiri atas : 1 orang kepala Bidang, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan tradisional (12 orang ), Seksi Rujukan (12 orang ), Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan (7 orang );
5. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebanyak 38 orang, terdiri atas : 1 orang kepala bidang, Seksi Surveilans dan Imunisasi (18 orang), Seksi

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (15 orang), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (5 orang);
6. Bidang Sumber Data Kesehatan sebanyak 33 orang terdiri atas : 1 orang Kepala Bidang, Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan (15 orang), Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (8 orang), dan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (9 orang).

#### **1.4. Sistematika Penulisan :**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- 2.1. Perencanaan
  - 2.1.1. Perencanaan Strategik
  - 2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2018
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- 2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
  - 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik
  - 3.2.2. Capaian Indikator Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.4. Akuntabilitas keuangan

##### **BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Keberhasilan
- 4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama
- 4.3. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik
- 4.4. Hambatan dan Permasalahan
- 4.5. Rencana Tindak Lanjut

## **LAMPIRAN**

- Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan**

#### **2.1.1 Rencana Strategik Tahun 2018 sampai Tahun 2023**

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah **“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- a. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- b. Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;.
- d. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing usaha Ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / Kota.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu

elayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan kesehatan adalah **Misi 2 yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, Berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan Tujuan Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.**

**a. Tujuan, Sasaran dan Strategi**

**1. Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Perumusan Tujuan Dinas kesehatan diperlukan sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat samapai 5 Tahun Mendatang, ialah **“Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”**

**2. Sasaran dan Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.**

**a. Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Dalam mewujudkan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu : **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

Untuk mancapai sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini di jabarkan dalam 13 indikator sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

**b. Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat**

Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu : **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”** di jabarkan dalam 13 indikator sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dimana indikator sasaran tersebut ialah :

- 1) Rasio Kematian Ibu;
- 2) Rasio Kematian Bayi;
- 3) Prevalensi Stunting;

- 4) Persentasi Penduduk terhadap Sanitasi yang layak (Jamban Sehat);
- 5) Persentase Kabupaten / Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%;
- 6) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB;
- 7) Prevalensi Hipertensi;
- 8) Persentase Penduduk yang berdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan;
- 9) Persentase Puskesmas yang terakreditasi;
- 10) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat;
- 11) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi;
- 12) Persentase Ketersediaan Obat esensial; dan
- 13) Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju iniversal Health Coverage.

### **c. Strategi, Kebijakan dan Program**

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam lima Tahun mendatang dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas Kebijakan dan Program sebagai berikut:

#### **1. Strategi**

- a. Memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, akademisi, badan usaha, komunitas dan media;
- b. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, kerjasama & kemitraan serta penyehatan lingkungan;
- c. Memperkuat pencegahan, pengendalian penyakit menular
- d. Memperkuat pencegahan, pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I),
- e. Memperkuat pencegahan, pengendalian tidak menular & Keswa terutama hipertensi dan merokok
- f. Optimalisasi Dana APBN dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

- g. Pemenuhan pelayanan Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
- h. Pemenuhan pelayanan kesehatan akibat bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
- i. Memperkuat pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
- j. Optimalisasi nusantara sehat dan pengabdian dokter
- k. Optimalisasi tenaga kesehatan PTT
- l. Pemenuhan regulasi, sarana dan prasarana layad rawat
- m. Pentahapan pelaksanaan layad rawat di kab/kota yang siap bekerjasama
- n. Peningkatan Jumlah Tim Pendamping Akreditasi Rumah Sakit
- o. Optimalisasi Nusantara sehat dan WKDS
- p. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
- q. Skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
- r. Rekrutmen Nakes dan Non Nakes PNS dan P3K Rumah Sakit dan UPT
- s. Peningkatan kerjasama perbatasan Provinsi dan Kerjasama Provinsi Anggota MPU
- t. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
- u. Optimalisasi Nusantara Sehat, dokter pengabdian masyarakat, rekrutmen tenaga kesehatan
- v. Penguatan kapasitas pengelolaan obat di dinkes kab/kota dan puskesmas
- w. Optimalisasi pembiayaan Kesehatan Provinsi dan daera kab/kota
- x. Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
- y. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan UPTD Provinsi
- z. Memperkuat regulasi, manajemen, Sistem Informasi Kesehatan

## 2. Kebijakan :

- a. Optimalisasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan;
- b. Optimalisasi dan Peningkatan Puskesmas PONEC (sarana, prasarana, nakes);
- c. Meningkatkan penatalaksanaan ibu hamil yang berisiko tinggi;
- d. Meningkatkan intervensi langsung kepada Ibu hamil
- e. Replikasi system informasi Sijari Emas, SMS gate way dan pengembangan inovasi aplikasi baru lain untuk penanganan persalinan
- f. Optimalisasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan
- g. Optimalisasi dan Peningkatan Puskesmas PONEC (sarana, prasarana, nakes)
- h. Meningkatkan penatalaksanaan bayi yang berisiko tinggi
- i. Meningkatkan intervensi langsung kepada bayi
- j. Optimalisasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan
- k. Peningkatan penyuluhan perubahan perilaku pada keluarga
- l. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media promosi kesehatan
- m. Meningkatkan intervensi langsung kepada balita stunting
- n. Mendorong kab/kota untuk meningkatkan pemucuan (STBM)
- o. Meningkatkan koordinasi data sasaran dengan Dinas Perumahan dan Perumahan Prov. Jabar
- p. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana jamban sehat, septic tank komunal dan Rutilahu
- q. Mendorong Kab/kota dalam pelaksanaan paradigma sehat melalui PIS PK
- r. Mendorong Kab/kota meningkatkan pelaksanaan Germas melalui Posyandu dan prolanis melalui Posbindu
- s. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan. monitoring dan evaluasi PHBS

- t. Optimalisasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan
- u. Peningkatan metode inovatif (media sosial, event promosi) dalam upaya promotive dan preventif
- v. Meningkatkan pelibatan tokoh masyarakat, dunia usaha, LSM tingkat provinsi dan mendorong tokoh masyarakat, dunia usaha, LSM tingkat Kabupaten/kota
- w. Meningkatkan angka kepatuhan minum obat, mengurangi missing kasus, penanggulangan TBC resisten obat.
- x. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular seperti HIV AIDS, ISPA, Hepatitis, Kusta, Polio, Filariasis, DBD, Diare.
- y. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- z. Optimalisasi pemanfaatan system informasi penyakit menular yang dikembangkan oleh Kemenkes
- aa. Meningkatkan peran dan komitmen semua sektor baik dalam sosialisasi maupun penggerakan sasaran
- bb. Meningkatkan kualitas, kompetensi petugas dan sarana prasarana penyimpanan vaksin
- cc. Meningkatkan kualitas pembinaan, monitoring dan evaluasi
- dd. Optimalisasi kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan
- ee. Mendorong meningkatkan pelayanan prolanis di Rumah sakit dan Puskesmas
- ff. Mendorong peningkatan skrening PTM & Keswa, pelaksanaan germas
- gg. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa; Standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan; Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- hh. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas barang/jasa; Standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia kesehatan; Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- ii. Penguatan Tim Binwasdal tingkat provinsi

- jj. Peningkatan Binwasdal dalam proses manajemen dan akreditasi di puskesmas dan dinkes kab/kota
- kk. Mendorong Kab/Kota dalam pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar terutama di wilayah perbatasan
- ll. Peningkatan Binwas perencanaan Kebutuhan SDM di kab/kota dan Puskesmas
- mm. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas perbatasan provinsi/ kabupaten/kota sesuai standar.
- nn. Pemenuhan regulasi layad rawat
- oo. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan manajemen layad rawat ke kab/kota
- pp. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana layad rawat dan PSC 119
- qq. Pemenuhan kebutuhan operasional tenaga kesehatan
- rr. Meningkatkan kapasitas Tim Pendamping akreditasi Rumah sakit
- ss. Meningkatkan Pembinaan Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit
- tt. Mendorong Kab/Kota dalam pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan kab/kota sesuai standar
- uu. Peningkatan Binwas perencanaan kebutuhan SDM RS dan P3K RS
- vv. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan RSUD Kab/Kota sesuai standar
- ww. Peningkatan akses rumah sakit dan sarana dan prasarana Rumah Sakit Provinsi sesuai standar
- xx. Peningkatan sarana dan prasarana UPT Dinas sesuai standar
- yy. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi sesuai standar
- zz. Penguatan PPK BLUD RSUD Provinsi
- aaa. Meningkatkan kerjasama program kesehatan pemerintah daerah provinsi dengan pemda wilayah perbatasan provinsi
- bbb. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan wilayah perbatasan provinsi dan wilayah Jabar Selatan
- ccc. Pemenuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan wilayah perbatasan provinsi dan wilayah Jabar Selatan

- ddd. Penguatan manajemen perencanaan kebutuhan dan buffer stock vaksin dan obat esensial
- eee. Meningkatkan kualitas pembinaan, monitoring dan evaluasi
- fff. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan
- ggg. Penyediaan anggaran SKTM di RS Provinsi
- hhh. Penyediaan anggaran SKTM untuk membiayai masyarakat miskin di lintas batas provinsi
- iii. Penguatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan UPTD Provinsi
- jjj. Peningkatan pelatihan, workshop tenaga kesehatan Dinas Kesehatan dan UPTD Provinsi
- kkk. Pemenuhan regulasi sistem informasi kesehatan tingkat provinsi
- lll. Pemenuhan kapasitas tenaga dan sarana prasarana sistem informasi kesehatan
- mmm. Meningkatkan kualitas data kesehatan dan tepat waktu
- nnn. Optimalisasi pemanfaatan semua aplikasi sistem informasi kementerian kesehatan

### **3. Program :**

- a. Program Promosi Kesehatan;
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- c. Program Pelayanan Kesehatan
- d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- e. Program Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi
- g. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi
- h. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan

### 2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Perencanaan Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu dengan **tujuan** : Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat dan **sasarannya** : Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

**Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :**

“Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”

**Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :**

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

**Indikator :**

1. Ratio Kematian Ibu
2. Ratio Kematian Bayi
3. Prevalensi Stunting
4. Persentase penduduk terhadap sanitasi yang layak (jamban Sehat)
5. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan rumah tangga ber PHBS >60%
6. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB
7. Prevalensi Hipertensi
8. Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan
9. Persentase Puskesmas yang terakreditasi
10. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat
11. Persentase Rumah Sakit terakreditasi
12. Persentase Ketersediaan obat esensial
13. Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal health coverage

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada sasaran yang terdapat pada RPJMD, dengan menetapkan **Indikator Kinerja Utama**, yang tercapai melalui Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Ratio Kematian Ibu, dengan target 86/100.000 KH
2. Ratio Kematian Bayi, dengan target 5,2/1000 KH
3. Prevalensi Stunting, dengan target 27,2 %
4. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB, dengan target 89%
5. Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan, dengan target 100%
6. Persentase Puskesmas yang terakreditasi, dengan target 94,76%
7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat, dengan target 29,63%
8. Persentase Rumah Sakit terakreditasi, dengan target 59,13%
9. Persentase Ketersediaan obat esensial, dengan target 90%

## 2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota pada Tahun 2019 bersumber dana APBD (setelah anggaran perubahan), APBN Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran) , dan PHLN serta anggaran APBN (DAK) yg di peroleh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat, dengan uraian sebagai berikut :

**A. Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 1.177.049.512.892,-** , dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pokok, sebesar Rp. 946.643.375.426,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Promosi Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 2.153.124.752,-, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar : Rp. 1.276.346.962,-
  - 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar : Rp. 876.777.790,-
  
- b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 1.178.513.241,-, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga), sebesar Rp. 189.871.000,-
  - 2) Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi, sebesar Rp. 620.398.373,-
  - 3) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM & Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019, sebesar Rp. 368.244.679,-
  
- c. Program Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 69.018.498.117,- (APBD),- dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp. 1.693.590.795,-
  - 2) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat, sebesar Rp. 1.237.597.700,-
  - 3) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, sebesar Rp. 1.841.031.250,-
  - 4) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp. 1.090.850.000,-
  - 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, sebesar Rp. 1.697.615.188,-
  - 6) Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer, sebesar Rp. 60.999.977.923,-
  - 7) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa barat, sebesar Rp. 457.838.594,-

- d. Program Program pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang dibiayai oleh APBD Provinsi, sebesar Rp. 8.095.793.882,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria, sebesar Rp. 208.150.000,-
  - 2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD, sebesar Rp. 300.000.000,-
  - 3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis & ISP, sebesar Rp. 285.000.000,-
  - 4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS, sebesar Rp. 997.500.000,-
  - 5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis, sebesar Rp. 438.000.000,-
  - 6) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis Dan Kecacangan, sebesar Rp. 347.950.000,-
  - 7) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular ISPA, sebesar Rp. 198.000.000,-
  - 8) Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta, sebesar Rp. 756.188.056,-
  - 9) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis Kusta, sebesar Rp. 1.137.480.000,-
  - 10) Kegiatan Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), sebesar Rp. 574.140.000,-
  - 11) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM, sebesar Rp. 2.853.389.000,-
- e. Program Sumber Daya Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 52.453.521.897,-, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan, sebesar Rp. 1.266.495.495,-
  - 2) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan, sebesar Rp. 2.000.000.000,-

- 3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin, sebesar Rp. 865.230.871,-
  - 4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 696.058.592,-
  - 5) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 44.734.771.907,-
  - 6) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat , sebesar Rp. 1.700.000.000,-
  - 7) Kegiatan Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, sebesar Rp. 1.191.000.000,-
- f. Program Manajemen Kesehatan anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 3.238.211.275,-, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 447.639.965,-
  - 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp. 251.120.000,-
  - 3) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain, sebesar Rp. 179.868.000,-
  - 4) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp. 1.924.889.394,-
  - 5) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan, sebesar Rp. 434.693.916,-

- g. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 1.956.626.797,-, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.099.830,-
  - 2) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.008.526.967,-
- h. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 822.423.759.290,-, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.999.957.838,-
  - 2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon alokasi anggaran sebesar Rp. 18.199.999.849,-
  - 3) Kegiatan Fasilitas Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-
  - 4) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.805.250.423,-
  - 5) Kegiatan Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.623.421,-
  - 6) Kegiatan Jasa Outsourcing Kebersihan dan keamanan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.211.598.466,-
  - 7) Kegiatan Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.530.096.500,-
  - 8) Kegiatan Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.785.768,-

- 9) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.927.558.999,-
- 10) Kegiatan Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.996.705,-
- 11) Kegiatan Jasa Konsultan perencanaan berkala Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.872.587,-
- 12) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 557.232.482,-
- 13) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 868.091.394,-
- 14) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Medis RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.044.483.300,-
- 15) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 621.508.460,-
- 16) Kegiatan Akreditasi RS dan Akreditasi Klinik Utama RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467247000,-
- 17) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.950.000,-
- 18) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.804.394,-
- 19) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.399.919,-
- 20) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.899.952,-
- 21) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.314.652,-

- 22) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.195.374.600,-
- 23) Kegiatan Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 591.849.865,-
- 24) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 874.955.000,-
- 25) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- 26) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.400.000,-
- 27) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 28) Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.675.000,-
- 29) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 30) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.764.278.976,-
- 31) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.064.023.705,-
- 32) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RS Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.367.815.175,-
- 33) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,-
- 34) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,-
- 35) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.099.999.832,-
- 36) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.342.950,-

- 37) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.475.997.500,-
- 38) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 626.048.250,-
- 39) Kegiatan Pengadaan peralatan kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.999.762,-
- 40) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.775.460.402,-
- 41) Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- 42) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- 43) Kegiatan Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- 44) Kegiatan Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.400.000,-
- 45) Kegiatan Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-
- 46) Kegiatan Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- 47) Kegiatan Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 291.862.500,-
- 48) Kegiatan Akreditasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.999.880,-
- 49) Kegiatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- 50) Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.083.335.000,-

- 51) Kegiatan Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.852.650.000,-
- 52) Kegiatan Penyediaan media informasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.812.500,-
- 53) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.100.000,-
- 54) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 55) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.377.850.788,-
- 56) Kegiatan Pembangunan Masjid di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.328.626.608,-
- 57) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.404.963.198,-
- 58) Kegiatan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.399.211.248,-
- 59) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.369.340.089,-
- 60) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.962.789.505,-
- 61) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.173.848.016,-
- 62) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.432.042.622,-
- 63) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.985.000.000,-

- 64) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK-Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.623.250.000,-
  - 65) Kegiatan Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.354.547.515,-
  - 66) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Al Ihsan (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.560.454.494,-
  - 67) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.828.041.720,-
  - 68) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Paru (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.545.580.000,-
  - 69) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Jampangkulon (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.707.650.000,-
  - 70) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.966.766.887,-
  - 71) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 623.808.750,-
  - 72) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan UPT Labkes (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.295.589.802,-
- i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan, anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 4.046.482.422,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.770.000,-
  - 2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.306.731.374,-

- 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.499.643,-
  - 4) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.600.000,-
  - 5) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.887.500,-
  - 6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.993.905,-
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan, anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 78.843.843.753,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.060.765.587,-
  - 2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.073.653.323,-
  - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 509.500.000,-
  - 4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.363.191.150,-
  - 5) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.631.403.763,-
  - 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.598.510.045,-

- 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.915.944.305,-
  - 8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.188.400,-
  - 9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.304.662.632,-
  - 10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.982.465.348,-
  - 11) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana di UPTD Pelatihan Kesehatan (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.582.700,-
  - 12) Kegiatan Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.976.500,-
2. Program Penunjang sebesar Rp. Rp. 133.641.137.466,- yaitu :
- a. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan, anggaran yang dibiayai oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 4.046.482.422,- dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.525.000,-
    - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.670.663,-
    - 3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.250.000,-
    - 4) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.500.000,-

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.102.419.341,-
- 6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.000.000,-
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.237.972,-
- 8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.949.413.393,-
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.636.721,-
- 10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.796.752,-
- 11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.496.768.676,-
- 12) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-
- 13) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 992.151.000,-
- 14) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparatur RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 701.647.450,-
- 15) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 852.714.000,-
- 16) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.052.776,-
- 17) Kegiatan Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.914.696.910,-
- 18) Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404.570.000,-

- 19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 802.813.000,-
- 20) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.950.000,-
- 21) Kegiatan Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 531.638.800,-
- 22) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.350.000,-
- 23) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.797.998,-
- 24) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.317.300,-
- 25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 822.984.250,-
- 26) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.052.462,-
- 27) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 334.827.517,-
- 28) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.146.972,-
- 29) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.953.117,-

- 30) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- 31) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 32) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,-
- 33) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.543.317.426,-
- 34) Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.419.950,-
- 35) Kegiatan Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.999.634,-
- 36) Kegiatan Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.096.727,-
- 37) Kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 899.990.000,-
- 38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,-
- 39) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 40) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.700.392.696,-
- 41) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.807.516,-
- 42) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.500.000,-
- 43) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-

- 44) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- 45) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.490.000.000,-
- 46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.089.247,-
- 47) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.490.000,-
- 48) Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.709.570.200,-
- 49) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.830.000,-
- 50) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.030.150.000,-
- 51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.826.270.000,-
- 52) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 728.182.000,-
- 53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.185.500.000,-
- 54) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.359.650.000,-

**B. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 229.523.633.913,-.**

**C. Alokasi anggaran bersumber APBN, dengan rician sebagai berikut :**

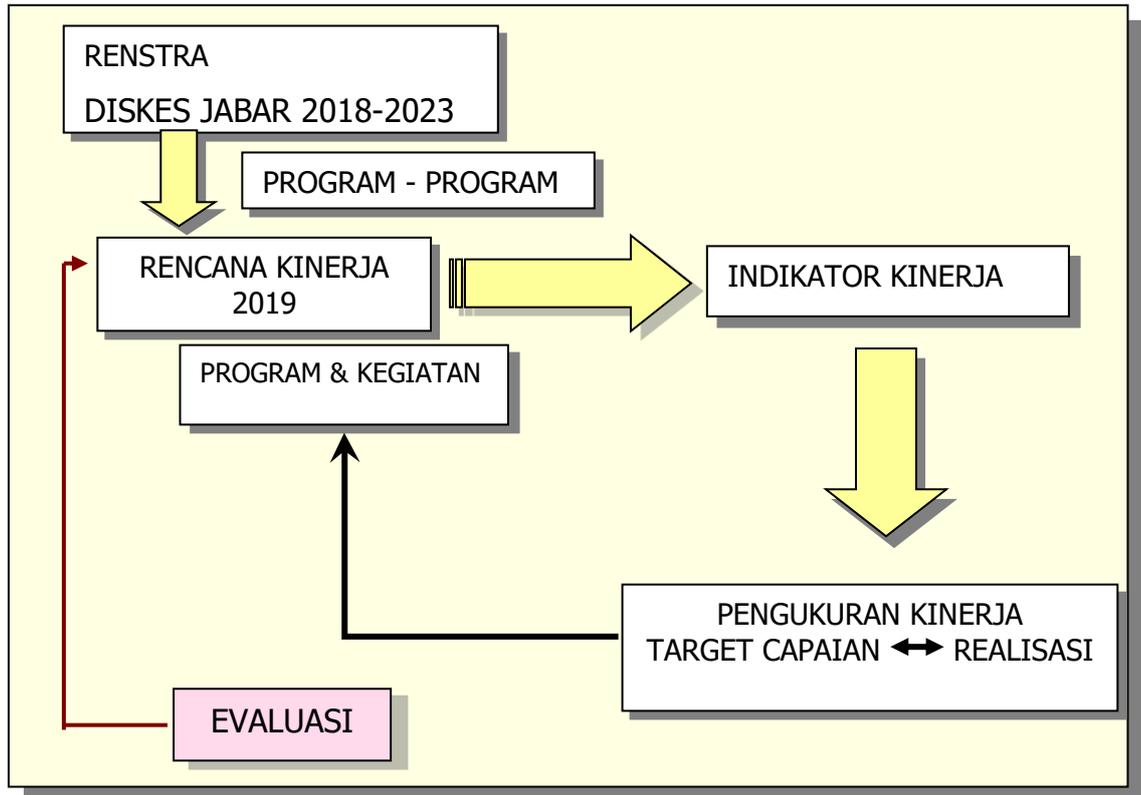
1. Anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 52.305.166.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebesar Rp. 3.409.881.000,-
  - b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, sebesar Rp. 1.450.220.000,-
  - c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp. 12.607.914.000 -
  - d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp. 2.066.009.000,-
  - e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp. 25.366.598.000,-
  - f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp. 2.393.564.000,-
  - g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 4.646.073.000,-
2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27 kab/kota dan 46 RSUD dari kab/kota, sebesar Rp. 1.584.594.634.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 164.052.218.000,- untuk 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 117.464.323.000,- untuk 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan Rujukan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 564.395.205.000,- untuk Rumah Sakit Umum Daerah/ Provinsi di 27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan untuk Sub Bidang Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 61.511.687.000,- untuk 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Penugasan Bidang Kesehatan untuk Sub Bidang Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 88.610.410.000,- untuk 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Kesehatan untuk Bappelkes Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.216.605.000,-
- g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 755.270.535.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota dan dinkes Provinsi di Jawa Barat
- h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub Bid. Akreditasi Rumah Sakit Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.127.880,- untuk 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
- i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub Bid. Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 69.823.194.000,- untuk 23 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
- j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub Bid. Akreditasi Labkesda Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.099.325.000,- untuk 14 Kabupaten/Kota dan 1 Labkesda Provinsi di Jawa Barat
- k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan BOK Sub Bid. Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 110.096.000.000,- untuk 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Secara garis besar tahapan yang dilakukan dalam melakukan penilaian kinerja pada kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut :



Sedangkan metode penilaian yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 adalah melalui proses skoring sesuai kesepakatan serta ditetapkan berdasarkan rencana strategis beserta analisisnya.

Pemberian Nilai/Makna terhadap pencapaian sasaran oleh Skala Ordinal.

Tahun 2019 Kategori penilaian sasaran terdapat 4 kategori, yaitu : Baik sekali, Baik, Cukup dan Kurang, dengan kriteria sebagai berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
≥ 100 %	Sangat Baik
> 80 - < 100 %	Baik
> 55 - < 80 %	Cukup
< 55 %	Kurang

**Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, sebagai berikut :**

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.2. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

#### A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Stratejik

**A.1. Capaian Kinerja Sasaran Stratejik Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :**

Capaian Indikator Kinerja dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan sasaran Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah, adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Rasio Kematian Ibu	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83%
		2 Rasio Kematian Bayi	5,2/1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%
		3 Prevalensi Stunting	27,2 %	26,21%	103,78%
		4 Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	75%	72,39%	96,52%
		5 Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%	40,7%	48,1 %	118,18%
		6 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	75%	84,27%
		7 Prevalensi Hipertensi	39%	39,6%	98,48%
		8 Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan	100%	100	100%
		9 Persentase Puskesmas Terakreditasi	94,76%	95,89 %	101,19%
		10 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat	29,63%	44,44%	149,98%
		11 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	59,13%	88.89 %	150,33%
		12 Persentase Ketersediaan Obat esensial	90%	94,33%	104,81
		13 Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage	85%	84,46%	99,36%

## A.2. CAPAIAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA/INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83%	Sangat Baik
		Rasio Kematian Bayi	5,2/1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%	Sangat Baik
		Prevalensi Stunting	27,2 %	26,21%	103,78%	Sangat Baik
		Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	75%	84,27%	Baik
		Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan	100%	100	100%	Baik
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	94,76%	95,89 %	101,19%	Sangat Baik
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat	29,63%	44,44%	149,98%	Sangat Baik
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	59,13%	88.89 %	150,33%	Sangat Baik
		Persentase Ketersediaan Obat esensial	90%	94,33%	104,81	Sangat Baik

## A.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicator*) merupakan suatu alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi sehingga memperoleh *informasi kinerja* yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; serta memperoleh *ukuran keberhasilan* dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pencapaian Kinerja Sasaran Utama berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai bahan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi serta capaian kinerja.

### A.3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

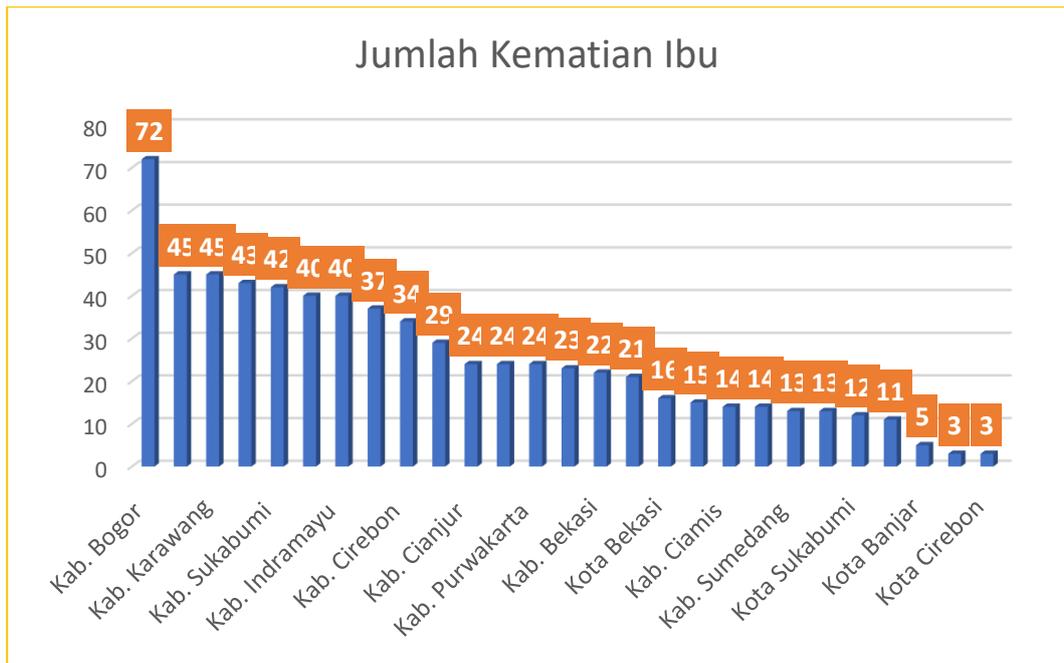
#### a) Rasio Kematian Ibu

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Rasio Kematian Ibu	87/100.000 KH	79,68/100.000 KH	109,19%	Sangat Baik	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83	Sangat Baik

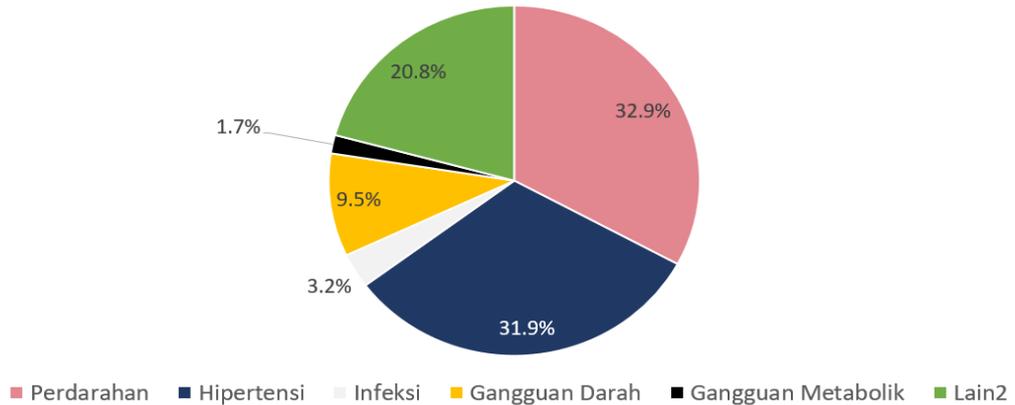
Tabel diatas memperlihatkan hasil Capaian Rasio Kematian Ibu tahun 2019 adalah 109,83% dari target 2018, hal ini mengalami Peningkatan sebesar 1,73% dari hasil Capaian tahun 2019 sebesar 109,83% dari target 2018, tetapi masih melampaui target yang sudah ditetapkan di tahun 2019.

Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu 78,3 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target yang ditetapkan sebesar 86/100.000 KH. Capaian tersebut merupakan wujud dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2019 kematian ibu tahun 2019 sebesar 684 kasus, ada penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 700 kasus, Penurunan sebanyak 16 kasus ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2019 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon , Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Depok. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini,



**Permasalahan** yang dihadapi adalah adanya tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Adapun penyebab tidak langsung dikarenakan kondisi ibu hamil anemia, Surveilans kematian ibu belum dijalankan dengan optimal, Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap pelayanan kasus kebidanan khususnya dimana ibu hamil yang memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di rujuk langsung ke FKTL namun harus dikelola di FKTP, sementara kasus-kasus kebidanan itu dapat terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila tidak segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar maka akan terjadi keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal. Penyebab kematian Ibu antara lain pendarahan sebanyak 32,9%, Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 31,9%, gangguan darah sebanyak 9,5%, Gangguan Metabolik sebanyak 1,7% dan 21% disebabkan lain-lain. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.



**Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat** untuk mencapai target indikator ialah :

- Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui penguatan sistem rujukan,
- Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas,
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kegawat daruratan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL),
- Peningkatan kemitraan dengan stake holder terkait,
- Perbaikan pencatatan dan pelaporan kematian melalui aplikasi
- penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan LP/LS terkait

Dokumentasi terkait Kegiatan



a) Rasio Kematian Bayi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Rasio Kematian Bayi	5,4/ 1000 KH	3,36/ 1000 KH	160,71%	Sangat Baik	5,2/ 1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%	Sangat Baik

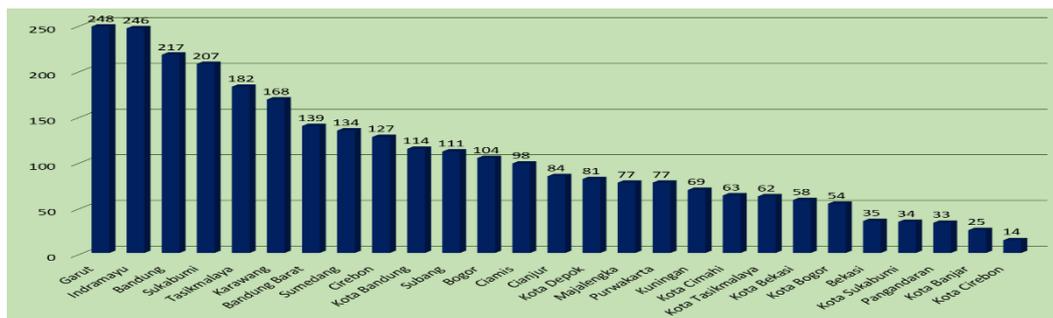
Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, yaitu didapat dari jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali **1000 KH**. Ratio kematian bayi tahun 2019 3,28/1000 KH menurun di dibandingkan tahun 2018 0,23. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian bayi.

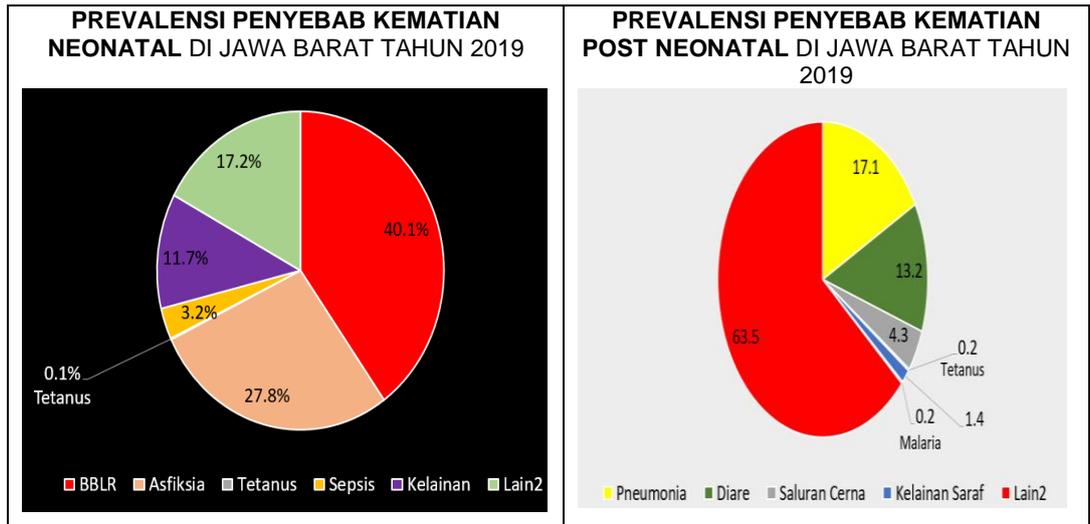
Pencapaian penurunan dibandingkan tahun 2018 disebabkan kematian neonatal pada tahun 2019 masih didominasi oleh 40,1% diakibatkan oleh BBLR, 27,8% disebabkan Asifikasia, 17,2% penyebab lain-lain dan 11,7% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 63,5% penyebab lain-lain, 17,1% disebabkan pneumonia, dan 13,2% disebabkan oleh diare.

Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2019 jumlah kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 2861 bayi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 3083 bayi.

10 kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2019 antara lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung. Keterangan diatas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini

**JUMLAH KEMATIAN BAYI DI JAWA BARAT TAHUN 2019**





Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah :

- Melakukan mapping ketersediaan input dan proses yang dilakukan kabupaten/kota dalam upaya penurunan kematian bayi
- Melakukan Koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu dan bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL)
- Penguatan sistem jejaring rujukan terintegrasi terutama untuk kasus-kasus kegawatdaruratan bayi
- Peningkatan Kualitas pencatan dan pelaporan kematian bayi melalui pemantapan pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans Dan Respons
- Mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait diwilayah kerja

Dokumentasi terkait Kegiatan



b) Prevalensi Stunting

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Prevalensi Stunting	29,2%	31,1%	93,69%	Baik	27,2%	26,21%	103,78%	Sangat Baik

Prevalensi Stunting yang digunakan sebagai target tahun 2019 adalah hasil survei nasional, dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi Stunting Provinsi Jawa Barat mencapai 26,21%. Pencapaian Prevalensi stunting sudah mencapai target karena nilainya lebih rendah dari target (27,2%) dan menurun sebesar 4,86% jika dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2018 sebesar 31,1%.

Prevalensi stunting sudah mencapai target namun angkanya masih diatas batas ambang masalah kesehatan masyarakat karena standar nasional adalah > 20%.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah :

- a. Melakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif
- b. Melakukan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

Dokumentasi terkait kegiatan



## c) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	88%	74%	84,09%	Baik	89%	75%	84,27%	Baik

Angka Keberhasilan Pengobatan / Treatment Succes Rate Tuberkulosis (TSR TB) adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru yang Terkonfirmasi Bakteriologi yang menyelesaikan pengobatan (baik yang Sembuh maupun Pengobatan Lenkap) diantara psien baru TB Paru Terkonfirmasi Bagkeriologis yang tercatat. Angka tersebut didapatkan dari penjumlahan angka kesembuhan (pasien yang dinyatakan sembuh) dan angka pengobatan lengkap (pasien yang dinyatakan pengobatannya lengkap). Angka Keberhasilan Pengobatan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan terhadap pengobatan pasien TB, karena bila angka keberhasilan pengobatan dibawah target (<85%) perlu diwaspadai adanya permasalahan TB dimasa yang akan datang, misalnya makin meningkatnya kasus kebal/resisten obat, meningkatnya kasus TB HIV, atau makin meningkatnya kasus TB dengan komorbid, lainnya TB dengan gizi buruk, TB dengan Diabetes Mellitus (DM), oleh karena itu dalam pengobatan pasien yang tidak mencapai keberhasilan dalam pengobatannya (baik sembuh atau pengobatan lengkap), maka harus diperhatikan dan harus ditelusuri dan ditindak lanjuti bila terjadi hal sebagai berikut :

- Pasien Putus berobat (berhenti pengobatan sebelum masa pengobatan selesai)
- Pasien Gagal pengobatan (hasil pemeriksaan mikroskopis masih tetap BTA positif pada bulan ke 5 atau pada akhir pengobatan).

Sumber data untuk pencapaian indikator TSR :

- Data TSR tingkat Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang merupakan hasil rekapitulasi kasus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sudah melaksanakan pelayanan TB secara standar (dengan Strategi DOTS).

- Entry data TB menggunakan aplikasi SITT( Sisten Informasi Tuberkulosis Terpadu) biasanya dilakukan oleh petugas Kab/Kota atau petugas Fasyankes.
- Entry data dilakukan setiap triwulan

Keberhasilan pengobatan TB di Jawa Barat pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018 dan tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan masih banyak kasus yang belum dievaluasi dan kasus pindah yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya yaitu sebanyak 15.869 kasus (17%), pasien TB yang putus pengobatan sebanyak 5.439 kasus (5,88%), pasien gagal pengobatan sebanyak 532 kasus (0,6%) dan meninggal selama pengobatan TB sebanyak 1.412 kasus (1,5%).

**Permasalahan** yang dihadapi dalam mencapai indikator ini adalah

- a. Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar
- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan
- c. Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal
- d. Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama ke petugas baru tidak dilakukan dengan baik

**Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat** untuk mencapai target indikator ialah :

- a. Pertemuan jejaring layanan pemerintah dan swasta tingkat provinsi dengan mengundang dinas kesehatan kab./kota dan organisasi profesi di kab./kota.
- b. Bimbingan teknis pengendalian TB ke dinas kesehatan kab./kota dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Menyampaikan feedback capaian penanggulangan TB dari kepala dinas kesehatan provinsi ke kepala dinas kesehatan kab./kota
- d. Pertemuan penguatan surveilans TB tingkat provinsi
- e. Pertemuan logistic TB
- f. Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi TB
- g. Workshop TB anak

- d) Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	-	-			100%	100%	100%	Baik

Indikator ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2019, dimana untuk indikator ini kita sedang mempersiapkan sarana dan prasarana terkait penanggulangan bencana, dimana di tahun 2018 indikator ini belum maksimal dikarenakan program bencana masih menyatu dengan program lain serta belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dikhususkan terhadap penanggulangan bencana, untuk kegiatan penanggulangan bencana ini tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah

1. Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Output kegiatan ini adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.

2. Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

*Output* kegiatan adalah Terlatihnya Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi bencana diwilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment.

e) Persentase Puskesmas Terakreditasi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Puskesmas Terakreditasi	256 pusk	387 pusk	151,17%	Sangat Baik	94,76%	95,89 %	101,19 %	Sangat Baik

Capaian persentasi Puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai target yaitu sebesar 95,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 94,76%.

Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah puskesmas terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 387 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 772 puskesmas (67,53%), sedangkan puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sebesar 256 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas siap akreditasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 1028 puskesmas (95,89%).

**Permasalahan** yang dihadapi, ialah :

1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu standar akreditasi puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan koordinasi dengan Kemenkes terkait standar baru akreditasi puskesmas
2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas secara berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum akreditasi maupun yang sudah akreditasi

Upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat untuk mendukung indikator ini adalah

1. Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan Surveior Jawa Barat,
2. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP
3. Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program di Dinas Kesehatan Kab/Kota

Dokumentasi Kegiatan



Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota

## f) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat	-	-			29,63%	44,44%	149,98%	Sangat Baik

Kegiatan Layad Rawat merupakan indikator baru yang ada pada renstra dinas kesehatan tahun 2019, kegiatan ini merupakan program inovasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah, program ini beryujuan agar warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Terkait indikator ini untuk baru tertuang dalam DPA tahun 2019 dan masih bersatu dengan kegiatan rutin pada Program Pelayanan Kesehatan, kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat, sehingga tahun 2018 belum ada kegiatan layad rawat. Kegiatan Layad Rawat yang terlaksana pada tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Pertemuan sosialisasi, advokasi, koordinasi Layad Rawat tingkat Provinsi, sebanyak 4 kali pertemuan
- 2) Pengadaan alat-alat angkutan bermotor sepeda motor Layad Rawat
- 3) Narasumber tim TP4D
- 4) Monitoring Evaluasi Layad Rawat
  - Workshop relawan Layad Rawat tingkat di 27 Kab/Kota
  - Monev Kegiatan
- 5) Pelatihan Layad Rawat bagi dokter, perawat dan bidan sebanyak 5 angkatan
- 6) Workshop sopir Layad Rawat tingkat Kab/Kota sebanyak 2 angkatan

Sehingga untuk indikator ini adalah Kabupaten Kota yang melaksanakan kegiatan Layad Rawat Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten/kota melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 8 Kab/Kota .

**Permasalahan** yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah

1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui proposal kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian motor ambulance roda dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan proposal.
2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni
3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir tahun.
4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan Kab/Kota dalam menerima kerjasama Layad Rawat
5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat ,terlaksana 4 kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.
6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada penyedia yang masuk dalam SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang bersedia untuk memberi talangan kegiatan tersebut .
7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance, tidak terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup menyelesaikan dalam waktu masa perubahan .
8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober 2019.
9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai di akhir Tahun anggaran.

Dokumentasi kegiatan



g) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	90 RS	70 RS	77,78%	Baik	59,13%	88,89 %	150,33%	Sangat Baik

Capaian persentasi Rumah Sakit siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai target yaitu sebesar 88,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 59,13%.

Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 70 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 229 Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2019 sebesar 91 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit teakreditasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 320 Rumah Sakit (88,89%)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah Masih ada Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit untuk akreditasi

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

1. Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit
2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Dokumentasi Kegiatan



Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit

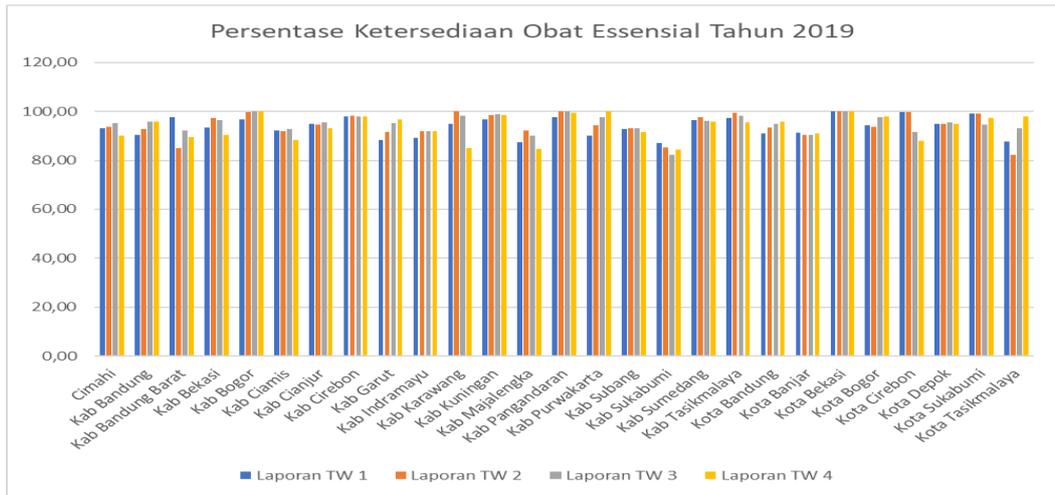
h) Persentase Ketersediaan Obat esensial

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Ketersediaan Obat esensial	70%	94,18%	134,54%	Sangat Baik	90%	94,33%	104,81	Sangat Baik

Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas sudah terpenuhi sesuai Target Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator ketersediaan obat yang diperoleh dari rekap ketersediaan 20 item obat esensial yg merupakan indikator ketersediaan obat puskesmas yang dikirim setiap bulan oleh seluruh puskesmas di Jawa Barat secara berjenjang yaitu laporan ketersediaan obat dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten dan kota dan kemudian dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dari dinas kesehatan provinsi kemudian dikirim ke kemenkes RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada di puskesmas, diantaranya obat wajib ada di puskesmas sebakaj 20 item obat yang wajib ada, yaitu : Albendazol tab, Amoxicillin 500 mg tab, Amoxicillin syrup, Deksametason tab, Diazepam injeksi 5 mg/mL, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL), Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid tablet 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam oralit, Glibenklamid/Metformin, Kaptopril tab, Magnesium Sulfat injeksi 20 %, Metilergometrin Maleat inj

0,200 mg-1 ml, Obat Anti Tuberculosis dewasa, Oksitosin injeksi, Parasetamol 500 mg tab, Tablet Tambah Darah, Vaksin BCG, Vaksin DPT/ DPT-HB/ DPT-HB-Hib, dan Vaksin Td. Berdasarkan laporan dari kab/kota tahun 2019 dapat digambarkan seperti dibawah ini,

NO	DAERAH	Laporan TW 1	Laporan TW 2	Laporan TW 3	Laporan TW 3	RATA-RATA Tahun 2019
1	Cimahi	93,00	93,85	95,26	90,00	93,03
2	Kab Bandung	90,54	92,91	95,89	95,92	93,82
3	Kab Bandung Barat	97,75	85,06	92,29	89,54	91,16
4	Kab Bekasi	93,29	97,21	96,38	90,51	94,35
5	Kab Bogor	96,60	99,87	100,00	99,98	99,11
6	Kab Ciamis	92,35	91,94	92,66	88,25	91,30
7	Kab Cianjur	94,78	94,67	95,60	92,97	94,51
8	Kab Cirebon	97,88	98,13	97,86	97,88	97,94
9	Kab Garut	88,36	91,60	95,11	96,85	92,98
10	Kab Indramayu	89,25	91,84	92,05	92,05	91,30
11	Kab Karawang	95,00	100,00	98,33	85,00	94,58
12	Kab Kuningan	96,63	98,38	98,74	98,59	98,08
13	Kab Majalengka	87,25	92,24	90,00	84,54	88,51
14	Kab Pangandaran	97,56	100,00	100,00	99,56	99,28
15	Kab Purwakarta	90,21	94,31	97,67	100,00	95,55
16	Kab Subang	92,67	93,09	93,24	91,54	92,64
17	Kab Sukabumi	87,21	85,38	82,31	84,52	84,85
18	Kab Sumedang	96,52	97,72	96,05	95,96	96,56
19	Kab Tasikmalaya	97,30	99,58	98,38	95,38	97,66
20	Kota Bandung	91,10	93,43	94,89	95,83	93,81
21	Kota Banjar	91,33	90,50	90,33	91,00	90,79
22	Kota Bekasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Kota Bogor	94,31	93,73	97,60	97,87	95,88
24	Kota Cirebon	99,85	99,78	91,75	87,88	94,82
25	Kota Depok	94,85	95,00	95,67	94,86	95,09
26	Kota Sukabumi	99,23	99,11	94,56	97,33	97,56
27	Kota Tasikmalaya	87,82	82,39	93,10	97,78	90,28
<b>RATA-RATA BULAN</b>		93,92	94,51	95,03	93,89	94,33



Permasalahan yang dihadapi ialah terdapat obat Program yang datang melebihi RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti obat TBC Kategori I (FDC Kat I).

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

1. Pertemuan RKO Kab/Kota
2. Pertemuan RKO RS Pemerintah
3. Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin
4. Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa

Dokumentasi kegiatan



Pertemuan RKO Kab/Kota

Pertemuan RKO RS Pemerintah



Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa



### A.3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIK

#### 1. Rasio Kematian Ibu

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Rasio Kematian Ibu	87/ 100.000 KH	79,68/ 100.000 KH	109,19%	Sangat Baik	86/ 100.000 KH	78,3/ 100.000 KH	109,83	Sangat Baik

Uraian indikator Rasio Kematian Ibu diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

#### 2. Rasio Kematian Bayi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Rasio Kematian Bayi	5,4/ 1000 KH	3,36/ 1000 KH	160,71%	Sangat Baik	5,2/ 1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%	Sangat Baik

Uraian indikator Rasio Kematian Bayi diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

#### 3. Prevalensi Stunting

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Prevalensi Stunting	29,2%	31,1%	93,69%	Baik	27,2%	26,21%	103,78%	Sangat Baik

Uraian indikator Prevalensi Stunting diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

#### 4. Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	55%	69,78%	126,87%	Sangat Baik	75%	72,39%	96,52%	Baik

Tahun 2019 target ditingkatkan dari 55% menjadi 75% (meningkat 20%), sementara realisasi untuk tahun 2019 tidak tercapai 100% karena data dari Kab/Kota fluktuatif (ada yang meningkat dan ada Kab/Kota yang mengalami penurunan capaian)

Permasalahan yang dihadapi ialah Belum semua Puskesmas melaporkan data capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka meningkatkan capaian akses penduduk terhadap sanitasi yang layak dengan memberikan data untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam membangun sarana fisik (karena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bukan OPD yang membangun sarana fisik)

5. Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%	40%	44,4%	111%	Sangat Baik	40,7 %	48,1 %	118,18 %	Sangat Baik

Pencapaian target Kab/Kota dengan cakupan Rumah Tangga ber PHBS 2 (dua) tahun berturut-turut melebihi target, dan realisasi target tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,7% yaitu tahun 2018 realisasi 44,4% menjadi tahun 2019 realisasi 48,1%.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.
2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pendataan PHBS Rumah Tangga.
3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama, ada yang pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan dengan cara sample atau dipantau

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Pertemuan Pembinaan PHBS Kolaborasi dengan PKK
2. Monitoring dan Evaluasi PHBS
3. Evaluasi PHBS melalui Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
4. Penguatan melalui kegiatan dan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Dokumentasi Kegiatan

Pertemuan Pembinaan PHBS



#### 6. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	88%	74%	84,09%	Baik	89%	75%	84,27%	Baik

Uraian indikator Persentase Keberhasilan Pengobatan TB diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

#### 7. Prevalensi Hipertensi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Prevalensi Hipertensi	29,08%	34,5%	84,28%	Baik	39%	39,6%	98,48%	Baik

Hasil perhitungan prevalensi hipertensi diperoleh dari data Riskesdas Tahun 2018 dimana angka prevalensi Provinsi Jawa Barat meningkat dari 34,5%

(data Riskesdas 2013) menjadi 39,6%. Peningkatan prevalensi hipertensi dikaitkan dengan perilaku dan pola hidup. Data Riskesdas 2018 pun menunjukkan pada penduduk usia 15 tahun keatas didapatkan data faktor risiko seperti proporsi masyarakat yang kurang makan sayur dan buah sebesar 95,5%, proporsi kurang aktifitas fisik 35,5%, proporsi merokok 29,3%, proporsi obesitas sentral 31% dan proporsi obesitas umum 21,8%. Pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan perubahan perilaku seperti berhenti merokok dan menghindari asap rokok, diet sehat dengan kalori seimbang, rendah gula, garam dan lemak serta tinggi serat, rajin aktifitas fisik dan menghindari alkohol.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah

1. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat minim
2. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan data program dan tidak rutin dilaporkan
3. Sering terjadi *turn over* dari petugas pemegang program P2PTM
4. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa Kabupaten/Kota masih sangat minim
5. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

- 1 Meningkatkan bimbingan teknis kepada Kab/Kota yang memiliki manajemen yang kurang untuk P2PTM baik untuk SDM maupun untuk anggaran
- 2 Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di Kab/Kota yang memiliki anggaran yang minim untuk kegiatan P2PTM
- 3 Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat
- 4 Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional
- 5 Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan
- 6 Melaksanakan kegiatan sosialisasi PTM kepada lintas program sehingga dapat meningkatkan sinergitas kegiatan di lapangan

- 7 Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam penggunaan Portal Web melalui *workshop*\_SI PTM
- 8 Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas dalam Program P2PTM melalui pelatihan atau *workshop* bersumberdana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
- 9 Pengadaan posbindu kit untuk pelaksanaan kegiatan deteksi dini di masyarakat dengan sumberdana APBD Kabupaten/Kota maupun Dana Desa yang berada di Kabupaten/Kota

Dokumen Kegiatan



8. Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	-	-			100%	100%	100%	Baik

Uraian indikator Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

### 9. Persentase Puskesmas Terakreditasi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Puskesmas Terakreditasi	256 puskesmas	387 puskesmas	151,17%	Sangat Baik	94,76%	95,89 %	101,19 %	Sangat Baik

Uraian indikator Persentase Puskesmas Terakreditasi diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

### 10. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan Layad Rawat	-	-			29,63%	44,44%	149,98%	Sangat Baik

Uraian indikator Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

### 11. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	90 RS	70 RS	77,78%	Baik	59,13%	88.89 %	150,33%	Sangat Baik

Uraian indikator Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

### 12. Persentase Ketersediaan Obat esensial

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase Ketersediaan Obat esensial	70%	94,18%	134,54%	Sangat Baik	90%	94,33%	104,81	Sangat Baik

Uraian indikator Persentase Ketersediaan Obat esensial diatas sudah diuraikan pada Indikator Kinerja Utama diatas

13. Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage

INDIKATOR SASARAN	2018				2019			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju universal Health Coverage	80%	83,17%	103,96%	Sangat Baik	85%	84,46%	99,36%	Baik

Pada tahun 2018, 27 Kabupaten/kota sudah berintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan pada trimester 3 mendapatkan anggaran dari pajak rokok untuk pembayaran premi, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan yang signifikan, sedangkan di tahun 2019 walaupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran dari pajak rokok dan lain-lain, dalam hal kepesertaan pada bulan Agustus pemerintah pusat Kementerian Sosial menerbitkan Kepmensos 79/huk/2019 tentang penonaktifan Peserta PBI APBN, di Jawa Barat ada sekitar 923.895 orang yang di nonaktifkan sehingga terjadi pengurangan kepesertaan yang signifikan, ditambah lagi ada pengurangan PBI daerah hasil Audit dari BPKP sekitar 10.344 orang yang mempengaruhi persentase kepesertaan juga.

Ditahun yang sama ada issue kenaikan tarif dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat yang mana menjadi pemikiran Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah kepesertaan, karena berhubungan dengan penyediaan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua pemerintah daerah Kabupaten/Kota mampu menyediakan anggaran dengan besaran premi setelah kenaikan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah

1. Adanya Peraturan - Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat FKTP maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Provinsi;

2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;
4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

1. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan JKN ke tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan;
2. Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Sosial, Bappeda dan Yansos Setda Provinsi Jawa Barat) dalam penyelesaian penonaktifan peserta PBI APBN; dilakukan percepatan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota dalam hal Penonaktifan Peserta PBI daerah;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kepastian kenaikan iuran dan Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam hal penyediaan anggaran untuk Premi 40% kewajiban Provinsi.

### A.3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

#### PENGUKURAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS		TAHUN 2019			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	2		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83	82/100.000 KH	104,73%
		Rasio Kematian Bayi	5,2/1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%	4,4/ 1000 KH	134,15%

	Prevalensi Stunting	27,2 %	26,21%	103,78%	19,2%	73,25%
	Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	75%	72,39%	96,52%	95%	76,2%
	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%	40,7%	48,1 %	118,18%	85,2%	56,46%
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	75%	84,27%	91%	82,42%
	Prevalensi Hipertensi	39%	39,6%	98,48%	36,6%	92,42%
	Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan	100%	100	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	94,76%	95,89 %	101,19%	99,81%	96,07%
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat	29,63%	44,44%	149,98%	100%	44,44%
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	59,13%	88.89 %	150,33%	98,55%	90,19%
	Persentase Ketersediaan Obat esensial	90%	94,33%	104,81	95%	99,29%
	Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage	85%	84,46%	99,36%	95%	88,91%
			Rata - Rata	113,48		

Berdasarkan rencana strategis Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Dinas kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 113,48 (sangat baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

## Perbandingan Realisasi indikator kinerja Tahun 2018 – 2019 dan target renstra tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERCEPATAN (PERLAMBATAN) %
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6
<b>SASARAN : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>					
1	Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	109,19%	109,83	0,64
2	Rasio Kematian Bayi	Per 1000 KH	160,71%	158,54%	-2,17
3	Prevalensi Stunting	Persen	93,69%	103,78%	10,09
4	Persentase Penduduk terhadap Sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)	Persen	126,87%	96,52%	-30,35
5	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%	Persen	111%	118,18%	7,18
6	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	84,09%	84,27%	0,18
7	Prevalensi Hipertensi	Persen	84,28%	98,48%	14,2
8	Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan	Persen	0,00%	100%	100
9	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persen	151,17%	101,19%	-49,98
10	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat	Persen	0,00%	149,98%	149,98
11	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	77,78%	150,33%	72,55
12	Persentase Ketersediaan Obat esensial	Persen	134,54%	104,81	-29,73
13	Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju universal Health Coverage	Persen	103,96%	99,36%	-4,6

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah termasuk di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus dapat menuangkan analisis efisiensi dan efektifitas kinerja yaitu anggaran dan realisasi belanja sebagai wujud upaya pencapaian Tujuan Dinas Kesehatan yang telah ditentukan.

Realisasi Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator sasaran strategis dan tugas pokok di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota pada Tahun 2019 bersumber dana APBD, APBN , dengan rincian :

1. **Belanja Langsung (APBD) sebesar Rp. 1.177.049.512.892,-,-** , dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 939.691.148.515,- (79,83%)**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Promosi Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Promosi Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Kesehatan Masyarakat Alokasi anggaran Program 2.153.124.752 dengan realisasi sebesar Rp 1.904.306.086 setara dengan 88,44 %.

- (1) Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.276.346.962,- dan realisasi sebesar Rp. 1.148.695.794,- atau setara dengan 90%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan /Monev PKRS; Jumlah Kab/Kota PHBS di Poskestren; Jumlah aktivitas Promosi Kesehatan melalui *issue actual*; Peringatan Hari Kesehatan Nasional; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring evaluasi PHBS; Penayangan ILM Audio Visual; Promosi kesehatan melalui berbagai media *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.777.790,- dan realisasi sebesar Rp. 755.610.292,- atau setara

dengan 86%. Output kegiatan adalah Jumlah Desa Siaga Aktif; Jumlah Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif di Kab/Kota se Jawa Barat; Jumlah Tokoh serta Mitra kesehatan mengikuti Sosialisasi dan Advokasi Jejaring di Provinsi Jawa barat; Jumlah Kab/Kota melaksanakan Replikasi Emas dalam penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Monitoring evaluasi Desa Siaga Aktif di Lokus Stunting. Outcome kegiatan adalah terwujudnya Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS.

b. Program Pengembangan lingkungan sehat

Capaian indikator kinerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Kesehatan Masyarakat. Alokasi anggaran Program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah sebesar Rp. 1.178.513.241,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.109.039.957,- setara dengan 94,10%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja & Olahraga) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.871.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.450.439,- atau setara dengan 97,67%. Output kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmaninya; Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pendampingan GP2SP; Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja. Outcome kegiatan adalah Persentase Puskesmas Di Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
- (2) Kegiatan Penguatan STBM Dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620.398.373,- dan realisasi sebesar Rp. 577.618.504,- atau setara dengan 93,1 %.Output kegiatan adalah Jumlah petugas Kab/ Kota yang mendapatkan Pembelajaran Program STBM; Jumlah Petugas Kab/ Kota Meningkatkan Wirausaha Sanitasi; Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Monev Program STBM; Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pendampingan Implementasi PAMSIMAS; Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan Pendampingan

kegiatan Kab/ Kota Sehat. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Yang Berkualitas

- (3) Kegiatan Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM & Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Bidang Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 368.244.679,- dan realisasi sebesar Rp. 347.103.304,- atau setara dengan 94,25%. Output kegiatan adalah Jumlah Petugas Kab/ Kota yang mengikuti Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes; Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM; Jumlah Orang yang Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Jumlah TPM yang Dijadikan Tempat Transit Jemaah haji yang Diperiksa Higiene Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan Higiene Sanitasi di Asrama Haji Bekasi; Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan Pemicuan STBM di DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan Kesehatan sebagai berikut Meningkatkan Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Layanan Kesehatan Alokasi anggaran Program Pelayanan Kesehatan adalah sebesar Rp. 69.018.498.117,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.657.929.992,- setara dengan 34.27%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.590.795,- dan realisasi sebesar Rp. 1.486.229.506,- atau setara dengan 88%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Keluarga; Orientasi SDIDTK bagi Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan di Tingkat Provinsi; Orientasi Pedoman Pelayanan Kesehatan Keluarga bagi Perguruan Tinggi di Tingkat Provinsi; Pertemuan Pemantapan dalam perencanaan Program KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA di 5 Kabupaten/ Kota; Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi;

- Pertemuan Evaluasi Model Sekolah sehat di Tingkat Provinsi;  
Pertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi;  
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Keluarga di  
Tingkat Provinsi; Pendampingan Program Kesehatan Keluarga;  
Pembinaan dan Pemenuhan Undangn Kegiatan Dalam Provinsi.  
*Outcome* kegiatan adalah Persentase Kabupaten/Kota Dengan  
Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%.
- (2) Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas  
Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.  
1.237.597.700,- dan realisasi sebesar Rp. 1.104.646.641,- atau setara  
dengan 89,25%. *Output* kegiatan adalah Rapat Koordinasi Peningkatan  
Gizi Masyarakat; Pertemuan evaluSi percepatan penurunan stunting;  
Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN); Rapat Penyusunan RAD  
Penurunan Stunting di Jawa Barat; Pertemuan evaluasi Peningkatan  
Gizi Masyarakat; Bimbingan Teknis Peningkatan Gizi Masyarakat;  
Pelacakan Kasus Gizi Buruk. *Outcome* kegiatan adalah Persentase  
Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah  
Pada Bumil Minimal 95%.
- (3) Kegiatan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir yang dilaksanakan  
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran  
sebesar Rp. 1.841.031.250,- dan realisasi sebesar Rp. 1.512.006.300,-  
atau setara dengan 82%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Evaluasi  
Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir;  
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Ibu  
dan Bayi Baru Lahir; Orientasi Tim Pendamping Kabupaten dalam  
Pendampingan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; Penyeliaan  
Fasilitatif di 5 Kabupaten; Pendampingan Klinis P4-K1 di 2 Kabupaten;  
Pemantapan AMP di Kab. Sumedang; Penyusunan MoU Rujukan;  
Penyusunan Maklumat Pelayanan; Worskhop APKJR; Pendampingan  
Klinis P1; Bimbingan Teknis K2; Penyeliaan Fasilitatif di Kabupaten  
Sumedang; Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi  
Program EMAS dan Penyusunan TIM POKJA di Kab. Ciamis;  
Assessment Fasyankes; Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes di Kab.

- Ciamis; Membangun Komitmen dan Workshop Pengenalan Tool Klinis Puskesmas dan RS di kab. Ciamis. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%.
- (4) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.090.850.000,- dan realisasi sebesar Rp. 994.019.624,- atau setara dengan 91%. Output kegiatan adalah Pembinaan, monitoring dan Evaluasi di FKTP, FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lainnya. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Puskesmas siap Akreditasi.
- (5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.697.615.188,- dan realisasi sebesar Rp. 1.484.973.195,- atau setara dengan 87%. Output kegiatan adalah Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan; Penguatan Pelaksanaan PPRA; Rakontek Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pertemuan Evaluasi RS Regional; Pertemuan Koordinasi Yankes Rujukan Kab/Kota; Pendampingan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS; sosialisasi BPRS, Pemantauan kegiatan RS yang bersifat non teknis medis, menangani keluhan yg bersifat non teknis medis; Monev Pelayanan Kesehatan Rujukan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM
- (6) Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.999.977.923,- dan realisasi sebesar Rp. 16.851.689.276,- atau setara dengan 27,62%. Output kegiatan adalah 27 Kab/Kota terfasilitasi , koordinasi dan monitoring dan evaluasi manajemen dan upaya pelayanan kesehatan primer; 27 Kab/Kota terpanatau pekayaan kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional; 27 Kab/Kota terfasilitasi, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi penguatan PIS-PK di Jawa Barat; 27 Kabupten/Kota bersinergi dengan provinsi dalam

bidang pelayanan kesehatan; 8 Kab/Kota kerjasama Layad Rawat; manajemen layad rawat di provinsi dan 8 Kabupaten/kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar

- (7) Kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.838.594,- dan realisasi sebesar Rp. 182.965.450,- atau setara dengan 39,96%. Output kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisioanl di Provinsi Jawa Barat sebesar 65, 81%; Jumlah pengelola Kestrad Kab/Kota mengikuti Rakor /pertemuan; Perwakilan Dinkes Kab/kota mengikuti acara workshop; Jumlah Kab/Kota dimonitor dan dievaluasi kestrad, unit aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan berbasis online Gan Hatra; Meningkatnya capaian kegiatan yankesprimer dan kestrad di 27 Kab/Kota di 1088 puskesmas yang tercapai 620 puskesmas , target 75% capaian 75 , 98%; Pembinaan dan Pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tidak terealisasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kabupaten/ kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional.

d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Capaian indikator kinerja Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Alokasi anggaran Program Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular adalah sebesar Rp. 8.095.793.882,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.065.994.500,- setara dengan 87,27%.

- (1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Malaria yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.082.550,- atau setara dengan 80%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Penguatan Jejaring dalam rangka Advokasi Percepatan eliminasi Malaria; Pertemuan Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Pemantauan

- Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Assessment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria
- (2) Kegiatan Pengendalian Penyakit DBD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 270.983.550,- atau setara dengan 90%. *Output* kegiatan adalah Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD; Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD; Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; Pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk.
  - (3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis & ISP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 285.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 258.188.500,- atau setara dengan 91%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Deteksi Dini Hepatitis pada Kelompok paling beresiko; Pertemuan Evaluasi & Perencanaan HPISP; Workshop LROA; Bimbingan Teknis HPISP. *Outcome* kegiatan adalah Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil.
  - (4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 997.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 911.432.112,- atau setara dengan 91%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Validasi Data Kasus HIV AIDS dan IMS; Pertemuan Jejaring HIV AIDS & Tripel Eliminasi di 4 Wilayah; Pertemuan Validasi Data TB HIV bagi Petugas TB HIV di Kab/Kota; Evaluasi Manajemen Program HIV dan IMS; Sinkronisasi Data Program HIV AIDS; Monitoring dan Evaluasi Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP); Monitoring Desentralisasi Obat ARV; Monitoring dan Evaluasi Layanan

- Konseling Tes. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pasien HIV yg di Obati.
- (5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 365.133.750,- atau setara dengan 83%. *Output* kegiatan adalah Bimbingan Teknis dan Monitoring P2 Zoonosis ke 10 kabupaten/kota; Monitoring dan Evaluasi P2 Zoonosis; Pertemuan Validasi Data; Perjanjian Kerjasama Antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah perihal Pengendalian Penyakit Menular di Perbatasan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies.
- (6) Kegiatan Pengendalian Penyakit Filariasis Dan Kecacingan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 347.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 285.868.320,- atau setara dengan 82%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Review Managemen Informasi Pelaporan Filariasis & Kecacingan berbasis online dengan aplikasi e-filca; Buku Pedoman P2 Cacingan sebanyak 640 buku; Pemantauan POPM Filariasis pada 3 kabupaten yaitu Kab. Bogor, Kuningan dan Purwakarta; Pemantauan Survei Penularan Kejadian Filariasis pada 2 Kab/Kota yaitu Kab. Subang dan Kota Bekasi; Pembinaan Eliminasi Filariasis sebanyak 14 Kab/Kota; Pembinaan Pengendalian Cacingan pada Kab/Kota non stunting sebanyak 8 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis.
- (7) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular ISPA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.094.250,- atau setara dengan 96%. *Output* kegiatan adalah Pertemuan Kewaspadaan Dini Avian Influenza; Pertemuan Validasi Data Program P2 ISPA; Pembinaan Pengendalian Penyakit ISPA ke 12 Kab/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kab/Kota yg 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pnemonia balita sesuai standar.

- (8) Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 756.188.056,- dan realisasi sebesar Rp. 723.349.753,- atau setara dengan 96%. *Output* kegiatan adalah Dokumen MOU tentang Penanggulangan Kusta pada anak sekolah; refrehsing Tatalaksana Kasus Kusta bagi petugas; monitoring evaluasi dan validasi data kusta di 27 kab./kota; Rekomendasi Tindaklanjut Permasalahan Kusta Dari Subdit Kusta Kementerian Kesehatan RI; pembelajaran penanganan Kusta di Provinsi Sulawesi Utara. *Outcome* kegiatan adalah Proporsi cacat kusta TK II.
- (9) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis Kusta yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.137.480.000,- dan realisasi sebesar Rp. 994.843.874,- atau setara dengan 87%. *Output* kegiatan adalah Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Tingkat Provinsi; Pertemuan PPM Tingkat Provinsi Jawa Barat (14 Kabupaten/Kota : Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kab. Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka); Pertemuan Penguatan Surveilans TB di Tingkat Provinsi; Pertemuan Logistik TB di Tingkat Provinsi; Workshop TB Anak di Tingkat Provinsi; Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi di Tingkat Provinsi; Assessment layanan TB RO di 9 Rumah Sakit; Monev dan bimtek LRI di 17 LRI; Surveilans TB di 27 Kab./kota; Bimbingan Teknis Program TB di 27 Kab./Kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate).
- (10) Kegiatan Pencegahan Penyakit Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 574.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 508.264.090,- atau setara dengan 89%. *Output* kegiatan adalah Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 8 kab/kota mendapat fasilitasi pengelolaan coldchain yang sesuai standar; 21 kab/kota mendapatkan fasilitasi

persiapan dan pelaksanaan BIAS tahun 2019; 17 kab/kota mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL; Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 54 peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 100 Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian PTM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.389.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.386.401.406,- atau setara dengan 83,63%. Output kegiatan adalah Sebanyak 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program P2PTM) mengikuti Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; Sebanyak 54 peserta (Pengelola Program P2PTM dan Penanggungjawab Data) mendapatkan sosialisasi SIPTM; Sebanyak 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan Perwakilan Dinas Pendidikan) mengikuti Pertemuan Koordinasi Upaya Berhenti Merokok di Sekolah; 54 peserta (Pengelola Program GIF Dinas Kesehatan dan 1 puskesmas terpilih) mendapatkan peningkatan kapasitas bagi petugas pada Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program P2 Keswa) mengikuti Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Kesehatan Jiwa bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Pengelola Program P2 Keswa dan 1 puskesmas terpilih) mengikuti Pertemuan Koordinasi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa serta Pengelola Program) mendapatkan peningkatan

kapasitas pada kegiatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota; 54 peserta (Kepala Seksi P2PTM dan Keswa atau Pengelola Program dan Guru BK dari 1 Sekolah terpilih) mendapatkan materi dalam Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 28 peserta (Direktur, Wadir, Kabid Medik dan Subbag Perencanaan) dari 7 RS Rujukan Regional di Jawa Barat mengikuti Pertemuan RS Rujukan Regional Kesehatan Jiwa bagi Petugas Provinsi dan Petugas RS di Jawa Barat; Bimbingan Teknis Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (PKKD) ke 17 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) ke 24 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Kasus Pasung pada Gangguan Jiwa ke 17 Kab/Kota; Bimbingan Teknis Gangguan Indera dan Fungsional (GIF) ke 25 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) ke 14 Kab/Kota; Monitoring dan Evaluasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) ke 16 Kab/Kota; kegiatan Skrining KTR dan Konseling UBM pada 4 sekolah terpilih di 16 Kab/Kota; Konsolidasi dan Konsultasi Kesehatan Jiwa ke Luar ke Jawa Timur. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU).

e. Program Sumber Daya Kesehatan

Capaian indikator kinerja Program Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Sumber Daya Kesehatan Alokasi anggaran Program Sumber Daya Kesehatan adalah sebesar Rp. 52.453.521.897,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.452.106.503,- setara dengan 94,13%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.266.495.495,- dan realisasi sebesar Rp. 838.604.450,- atau setara dengan 66,21%. *Output* kegiatan adalah Tersedianya Pelatihan Penggerak Obat Rasional; Pelatihan Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan Toga

untuk Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak; Pelatihan Kusta bagi Dokter Puskesmas; Pelatihan Kusta bagi Petugas Kusta Puskesmas; Pelatihan Pengelola Vaksin dan Cold Chain; Pelatihan Petugas Imunisasi Puskesmas; Bimbingan Teknis Laboratorium Lapangan; Pertemuan Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan.

- (2) Kegiatan Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.097.032.600,- atau setara dengan 54,85%. *Output* kegiatan adalah Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; Pengelolaan data SDM di Fasilitas Kesehatan; Evaluasi Pendamping Puskesmas dan Pendamping RS, Direktur RS dan Dinas Kesehatan di Jawa Barat; Koordinasi Pengelolaan TKWNA & WKDS; Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan; Koordinasi MTKP; Pengelolaan Registrasi; Pengelolaan peningkatan mutu tenaga; Pengelolaan WKDS; Pengelolaan RPL. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Nutu Tenaga Kesehatan.
- (3) Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 865.230.871,- dan realisasi sebesar Rp. 774.746.269,- atau setara dengan 89,54% *Output* kegiatan adalah Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota; Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; Monev Ketersediaan Obat bagi Unit Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota; Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa; Maintenance Software e logistik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Obat Esensial.

- (4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat Rasional, Peredaran sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 696.058.592,- dan realisasi sebesar Rp. 638.497.361,- atau setara dengan 92%. *Output* kegiatan adalah Monev Pelaksanaan Gema Cermat; Pertemuan Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional; Pertemuan Evaluasi Gema Cemat pada Stakeholder; Workshop Formularium; Monitoring Sarana Kefarmasian dan Alkes. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan.
- (5) Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.734.771.907,- dan realisasi sebesar Rp. 43.532.045.561,- atau setara dengan 97,31%. *Output* kegiatan adalah Laporan bulanan kinerja nakes non PNS; Pendayagunaan Tenaga Kesehatan non PNS; Honor tenaga pengelola; evaluasi dr, drg, bidan dan nakes lain non PNS. Monitoring evaluasi. *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan.
- (6) Kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.528.595.673,- atau setara dengan 89,92%. *Output* kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan; Rapat persiapan; Pelaksanaan Pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan; *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan.  
Kegiatan Penguatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.191.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.033.046.950,- atau setara dengan 87%. *Output* kegiatan adalah Penguatan penyelenggaraan JKN dan pembiayaan di kab/kota provinsi Jawa Barat; pelaksanaan persiapan penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; Pelaksanaan Cap building agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; Rapat koordinasi dan evaluasi pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah; pelaksanaan

penyusunan PHA/DHA di Provinsi Jawa Barat; pelaksanaan rencana aksi multi pihak dalam pencapaian UHC; pelaksanaan identifikasi pelaksanaan JKN. *Outcome* Kegiatan adalah Persentase Pembiayaan Kesehatan Pbi Ke Kab/Kota

**f. Program Manajemen Kesehatan**

Capaian indikator kinerja Program Manajemen Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Layanan Manajemen Kesehatan Alokasi anggaran Program Manajemen Kesehatan adalah sebesar Rp. 3.238.211.275,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.660.767.537,- setara dengan 82,16%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.639.965,- dan realisasi sebesar Rp. 368.655.064,- atau setara dengan 82,35%. *Output* kegiatan adalah Akreditasi Institusi; Akreditasi Pelatihan; Riview Kurikulum dan Modul; Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan.
- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 251.120.000,- dan realisasi sebesar Rp. 218.919.482,- atau setara dengan 87,17%. *Output* kegiatan adalah Akreditasi Laboratorium Kesehatan; Penyelenggaraan Uji Profisiensi pemeriksaan mutu eksternal Laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi.
- (3) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 179.868.000,- dan realisasi sebesar Rp. 47.557.083,- atau setara dengan 26,44%. *Output* kegiatan adalah MoU Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah kerjasama program bidang kesehatan.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.924.889.394,- dan realisasi sebesar Rp. 1.664.848.066,- atau setara

dengan 86,49%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Draft Tabel Profil Kesehatan; Jumlah hasil laporan dan kesepakatan pemutakhiran data kesehatan tahun 2018; Jumlah Buku Profil Kesehatan Prov Jawa Barat Tahun 2018; Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti pertemuan GIS; Jumlah Pengelola data RSUD di Kab/Kota mengikuti pertemuan sistem informasi Rumah Sakit (SIRS); Jumlah pengelola data di Kab/Kota mengikuti pertemuan sistem informasi kesehatan (SIK); Monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan di Kab/Kota; Jumlah Laporan hasil kaji Banding Sistem Informasi Kesehatan; Jumlah pengadaan aplikasi video conference (V Meet). *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Buku Profile Kesehatan.

- (5) Kegiatan Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 434.693.916,- dan realisasi sebesar Rp. 360.787.842,- atau setara dengan 82,99%. *Output* kegiatan adalah Draft Dokumen Regulasi Bidang Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat.

**g. Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi**

Capaian indikator kinerja Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi sebagai berikut Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Alokasi anggaran Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi adalah sebesar Rp. 1.956.626.797,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.468.866.500,- setara dengan 75,07%.

- (1) Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 948.099.830,- dan realisasi sebesar Rp. 863.454.820,- atau setara dengan 91,07%. *Output* kegiatan adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan

Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayani di lokasi Bencana.

- (2) Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.008.526.967,- dan realisasi sebesar Rp. 605.411.680,- atau setara dengan 60,02%. *Output* kegiatan adalah Terlatih Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi bencana di wilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan atau KLB di wilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment.

#### **h. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi**

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi sebagai berikut Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Alokasi anggaran Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi adalah sebesar Rp. 822.423.759.290,- dengan realisasi sebesar Rp. 660.843.054.316,- setara dengan 98,08%.

- (1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Habis RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.999.957.838,- dan realisasi sebesar Rp. 9.960.940.409,- atau setara dengan 99,60%. Output kegiatan adalah Jumlah Obat Generik sebanyak 273 Jenis, Jumlah Bahan Habis Pakai Farmasi 153 Jenis, Jumlah Bahan Habis Pakai Ruang Operation Komer (OK) sebanyak 3 Jenis. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- (2) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon alokasi anggaran sebesar Rp. 18.199.999.849,- dan realisasi sebesar Rp. 16.578.256.229,- atau setara dengan 91,08%. Output kegiatan adalah Jumlah Alat Kedokteran Umum 519 Unit, Jumlah Alat Kedoktera Bedah 22 Unit; Jumlah Alat Kedokteran Anak 4 Unit; Tersedianya Alat Laboratorium 4 Unit, Jumlah Generator Oksigen 1 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (3) Kegiatan Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.152.978.400,- atau setara dengan 90,58%. Output kegiatan adalah Biaya sharing Pasien Gakin R. Jalan 2.500 Pasien Biaya sharing Pasien Gakin R. Inap 500 Pasien. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (4) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.805.250.423,- dan realisasi sebesar Rp. 16.993.456.824,- atau setara dengan 59%. Output kegiatan adalah Pembangunan Gedung Rawat Jalan 1 Unit; Pembangunan Gedung Farmasi 1 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (5) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan /Audit Indevenden RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi sebesar Rp. 0 atau setara dengan 0%. Output kegiatan adalah Tiak dilaksanakan, Effisiensi anggaran kegiatan tersebut dialokasikan dari kegiatan Pelayanan BLUD. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (6) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RS Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi sebesar Rp. 0 atau setara dengan 0%. Output kegiatan adalah Tidak dilaksanakan, Efisiensi anggaran kegiatan tersebut dialokasikan dari kegiatan Pelayanan BLUD. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (7) Kegiatan Jasa Kalibrasi Alat kesehatan/kedokteran RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.623.421,- dan realisasi sebesar Rp. 152.644.571,- atau setara dengan 50,27%. Output kegiatan adalah Kalibrasi Alat Diagnostik 149 alat; Kalibrasi Alat Kalibrator 50 Alat; Kalibrasi Alat Life Support & Therapy 265 Alat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (8) Kegiatan Jasa Outsourcing Kebersihan dan keamanan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.211.598.466,- dan realisasi sebesar Rp. 3.881.257.370,- atau setara dengan 92,15%. Output kegiatan adalah Dibayarkannya jasa outsourcing Kebersihan 12 Bulan, dan dibayarkannya jasa outsourcing Keamanan 12 Bulan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (9) Kegiatan Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.530.096.500,- dan realisasi sebesar Rp. 3.913.611.224,- atau setara dengan 86,39%. Output kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Alat Listrik/Elektronik 2 Unit; Jumlah Pengadaan Tabung Oksigen 50 Tabung; Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Pakaian Perawat dan dokter 35 Stel; Jumlah Pengadaan Travo 1 Unit; Jumlah Pengadaan Sperpart Mesin Rumput 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Alat Pemelihara Pertamanan 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Almari 9 Jenis; Jumlah Pengadaan Brankas 1 Unit, Pengadaan Filling Kabinet 13 Unit; Jumlah Pengadaan Mesin Jahit 2 Unit; Jumlah Pengadaan Penunjuk Waktu 10 Buah; Jumlah Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 25 Unit; Jumlah Pengadaan Trolley 10 Unit; Jumlah Pengadaan Televisi 25 Unit;

Jumlah Pengadaan Tangga 6 Unit; Jumlah Pengadaan Komputer PC 5 unit; Jumlah Pengadaan Komputer Note Book 8 Unit; Jumlah Pengadaan Printer 12 Unit; Jumlah Pengadaan Scanner 6 Unit; Jumlah Pengadaan Accesories Komputer & Jaringan 3 Jenis Pengadaan Pringerprint 6 Unit; Jumlah Pengadaan Meja Kerja 12 Set; Jumlah Pengadaan Kursi Kerja 17 Unit; Jumlah Pengadaan Kursi Rapat 150 Buah; Jumlah Pengadaan Sofa 7 Unit; Jumlah Pengadaan Kursi Tunggu Pasien 25 Unit; Jumlah Pengadaan Dispenser 10 Unit; Jumlah Pengadaan Kulkas 11 Unit; Jumlah Pengadaan Alat Dapur 11 Jenis; Jumlah Pengadaan Gordyn 260 Meter; Jumlah Pengadaan Camera 1 Unit; Jumlah Pengadaan CCTV 30 titik; Jumlah Pengadaan Infocus 2 Unit; Jumlah Pengadaan Sound System 1 Set; Jumlah Pengadaan Hand Railling 219 Unit; Jumlah Pengadaan Regulator Oksigen 50 Unit; Jumlah Pengadaan PJU Solar Cell 15 Titik; Jumlah Pengadaan Kubikal 1 Unit; Jumlah Pembuatan Sumur Bor 4 Titik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (10) Kegiatan Pembuatan AMDAL RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.785.768,- dan realisasi sebesar Rp. 480.603.531,- atau setara dengan 60,09%. Output kegiatan adalah Tersedianya Biaya Konsultan Pembuatan AMDAL 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (11) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.927.558.999,- dan realisasi sebesar Rp. 1.708.428.552,- atau setara dengan 88,63%. Output kegiatan adalah Jumlah belanja Cetak; Jumlah belanja Cinderamata; Jumlah Belanja Dekorasi dan Desain Interior dan Eksterior; Jumlah Belanja Iklan di televisi; Jumlah Belanja Jasa EO Study Banding; Jumlah Belanja Pembuatan Video animasi; Jumlah Belanja Plakat; Jumlah Belanja Produksi Video; Jumlah Belanja Souvenir VIP; Jumlah ATK; Jumlah Iklan di Radio; Jumlah Penayangan ILM Bioskop; Jumlah Spot Iklan Media Elektronik (Radio); Jumlah Iklan layanan masyarakat di media cetak/elektronik; Jumlah Jingle; Jumlah

- Sewa Sarana penyelenggaraan tenda; Jumlah panggung; Jumlah stand; Jumlah Belanja Dokumentasi dan Publikasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (12) Kegiatan Pembuatan DED Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 999.996.705,- dan realisasi sebesar Rp. 756.412.721,- atau setara dengan 75,64%. Output kegiatan adalah DED Gedung Rawat Inap 1 dokumen; Jumlah DED Gedung IBS ICU 1 Gedung; Jumlah DED Gedung IPSRS 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Jenazah 1 Dokumen; Jumlah DED Pembuatan Landscape 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Genset 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Gizi 1 Dokumen; Jumlah DED Gedung Workshop 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (13) Kegiatan Jasa Konsultan perencanaan berkala Pembangunan Gedung Rawat Jalan Baru & Gedung Diagnostic Center RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.872.587,- dan realisasi sebesar Rp. 430.757.500,- atau setara dengan 99,51%. Output kegiatan adalah Biaya Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Jalan; Jumlah Gedung Farmasi 1 Dokumen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (14) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 557.232.482,- dan realisasi sebesar Rp. 498.032.500,- atau setara dengan 89,37%. Output kegiatan adalah Jumlah Cinderamata rehabilitan Peserta Poskesremen; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio tata rias; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio tata boga; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio musik; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio keputrian; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio kerohanian; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio psikomotor; Jumlah Bahan Praktek untuk terapi studio kreatif; Jumlah Belanja Jasa Event Organizer Kegiatan Poskesremen; Jumlah Sewa stand/booth/tempat pameran; Jumlah Sewa pakaian Adat sesuai tema kesenian; Jumlah Pakaian Batik Untuk Poskesremen; Jumlah Pakaian Olahraga lengkap

Untuk Poskesremen; Jumlah Papan nama; Jumlah Sewa Alat Kesenian Poskesremen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (15) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Keperawatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 868.091.394,- dan realisasi sebesar Rp. 844.239.944,- atau setara dengan 97,25%. Output kegiatan adalah Tersedianya Belanja Alat tulis Kantor; Jumlah Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Ruang Perawatan Pasien : 1 keg; Jumlah Souvenir : Belanja Paket Perlengkapan Pasien Rawat Inap : 1 keg; Jumlah Belanja Linen Pasien Rawat Inap : 1 Keg; Jumlah Pakaian Pasien Harian : 1 keg; Jumlah Mamin Rapat dan Perjalanan Dinas Jan. S.d Desember 2019. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (16) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Medis RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.044.483.300,- dan realisasi sebesar Rp. 912.899.933,- atau setara dengan 87,40%. Output kegiatan adalah Tersedianya Belanja Penggandaan/Penjilidan Mamin Rapat; Jumlah Perjalanan Dinas Jan s.d Juli 2019; Jumlah Belanja Alat-Alat Rehabilitasi Medik (Infra Red Lamp on Mobile Stand) : 1 Keg; Jumlah Belanja Rehabilitasi Medik (Thermo Three (Infra Red Lamp with 3 Spot) : 1 Keg; Jumlah X-Ray Viewer: 1 Keg; Jumlah Emergency Kit: 1 Keg; Jumlah termometer Infrared: 1 Keg; Jumlah tensimeter Digital Dewasa: 1 Keg; Jumlah Timbangan Bayi: 1 Keg; Jumlah Regulator O2: 1 Keg; Jumlah AED Plus: 1 Keg; Jumlah Hacting Set: 1 Keg; Jumlah Matras Decubitus: 1 Keg; Jumlah Timbangan Badan + Tinggi Badan: 1 Keg; Jumlah Portable Suction Pump: 1 Keg; Jumlah Kursi Roda: 1 Keg; Jumlah Termometer Digital: 1 Keg; Jumlah Timbangan Biasa: 1 Keg. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (17) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 621.508.460,- dan realisasi sebesar Rp. 507.892.928,- atau setara dengan 81,72%. Output kegiatan adalah Jumlah Belanja sewa forklift; Jumlah Belanja

Perjalanan Dinas Dalam provinsi; Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi; Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Jumlah Lemari Laundry Stainless Steel; Jumlah Meja Stainles Steel/Work Table; Jumlah Mesin pengering; Jumlah ATK dan Dispenser Chemical. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (18) Kegiatan Akreditasi RS dan Akreditasi Klinik Utama RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467247000,- dan realisasi sebesar Rp. 356.524.747,- atau setara dengan 76,30%. Output kegiatan adalah Tersedianya Belanja ATK; Jumlah Bimbingan Akreditasi RSJ; Jumlah Survei Verifikasi Akreditasi RS Jiwa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (19) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 268.921.800,- atau setara dengan 95,38%. Output kegiatan adalah Jasa sertifikasi pemantapan mutu eksternal Lab (1 keg); Jumlah Pengadaan Ducting Exhaust Fan dan Instalasinya (1 keg); Jumlah Pengukuran paparan radiasi pada petugas (1 keg); Jumlah Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi (1 keg); Jumlah Fotocopy; Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah; Jumlah Belanja Mamin Rapat; Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur (Mesin Pengemas Wrapping) (1 keg). *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (20) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.804.394,- dan realisasi sebesar Rp. 1.001.840.210,- atau setara dengan 82,61%. Output kegiatan adalah Tersedianya biaya Pemeriksaan Air Bersih, Limbah, Uji Laboratorium/Uji Sampling Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2019; Jumlah Pemilahan dan pemusnahan limbah domestik (4 keg). *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (21) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.399.919,- dan realisasi sebesar Rp. 178.255.549,- atau setara dengan 65,92%. Output kegiatan adalah Tersedianya biaya Jasa Profesi Asesor Penilaian Akreditasi RS Pendidikan; Sewa kamar Hotel; Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (22) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.899.952,- dan realisasi sebesar Rp. 221.004.460,- atau setara dengan 98,71%. Output kegiatan adalah Penelitian dan Pengembangan Pelayanan (Survey kepuasan pelanggan proses); Biaya Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi; Tersedianya Biaya mamin rapat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (23) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.314.652,- dan realisasi sebesar Rp. 151.899.242,- atau setara dengan 88,15%. Tersedianya Biaya Jasa Akomodasi Fullboard (Konsinyiring); Biaya Mamin Rapat ; tersedianya biaya Fotocopy dan penjiilidan; Tersedianya biaya Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi Jan s.d Desember 2019; tersedianya biaya ATK. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (24) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.195.374.600,- dan realisasi sebesar Rp. 2.916.316.852,- atau setara dengan 91,827%. Output kegiatan adalah Jumlah Mesin Penghancur Kertas (1 keg); Jumlah Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book ( HP Spectre X 360 )(1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book ( HP NB )(5); Jumlah 1 (keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson LQ-310 (1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah Epson L 1800 (1 keg); Jumlah Belanja modal Pengadaan Printer; Jumlah HP M 254NW (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu ;

Jumlah DANKHA WC 054 (4 duduk) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson L 3110 (7) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Televisi ( TV LED 40 & 32 ) (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan UPS/Stabilizer (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Kursi Kerja (15 Dir; Jumlah 4 Lab; Jumlah 32 Staff ) (1 keg); Jumlah Belanja Alat-alat Rumah Tangga / Dapur Pakai Habis Spesifikasi : Bantal; Jumlah Kasur; Jumlah Kabel Roll/Gulung (1 keg); Jumlah Belanja Modal pengadaan Printer; Jumlah Epson L 3110 (1) (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sofa (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja Makan (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Handycam (1 keg); Jumlah Camera Digital (1 keg); Jumlah Charger Box Costum (1 keg); Jumlah DVD Combo dan DVD Player (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Sound System Microphone Wireles dan Speaker Aktif (1 keg); Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Khusus Pengangkut Makanan (1 keg); Jumlah PABX (1 keg); Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (1 keg); Jumlah Belanja Modal Pengadaan Dispenser (1 keg); Jumlah Pengadaan Alat Dapur (1 keg); Jumlah CCTV (1 keg); Jumlah Pengadaan Peralatan Bengkel Elektro (1 keg); Jumlah Pengadaan Visual Elektronik Mesin Antri + Monitor (1 keg); Jumlah Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran (1 keg); Jumlah mamin Rapat dan Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi jan s.d Desember 2019. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (25) Kegiatan Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 591.849.865,- dan realisasi sebesar Rp. 567.563.650,- atau setara dengan 95,90%. Output kegiatan adalah Tersedianya biaya ATK; tersedianya biaya Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) Penyusunan DED Gedung dan Review DED. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (26) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 874.955.000,- dan realisasi sebesar Rp. 622.712.039,- atau setara dengan 71,17%. Output kegiatan adalah Penanganan Pasien Pasung : Januari (Penjemputan : 0; Jumlah Pemulangan : 0; Jumlah Pendampingan : 0; Jumlah Diantar Stakeholder : 3; Jumlah Februari Penjemputan : 5; Jumlah Pemulangan : 0; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 0; Jumlah Maret Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 4; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah April Penjemputan : 5; Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 3; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah Mei Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan : 6; Jumlah Pendampingan : 1; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah Juni Penjemputan : 2; Jumlah Pemulangan : 5; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 7; Jumlah Juli Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 1; Jumlah Pendampingan : 6; Jumlah Diantar Stakeholder : 5; Jumlah Agustus Penjemputan : 7; Jumlah Pemulangan : 5; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 2; Jumlah September Penjemputan : 10; Jumlah Pemulangan : 6; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder : 1; Jumlah Oktober Penjemputan : 6; Jumlah Pemulangan : 7; Jumlah Pendampingan : 2; Jumlah Diantar Stakeholder. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (27) Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.476.265.400,- atau setara dengan 59,05%. Output kegiatan adalah Tersedianya biaya pasien JPKM Bulan Januari s.d Desember 2019 sebanyak 1.361 pasien. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (28) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 323.156.239,- atau setara dengan 99,61%. Output kegiatan adalah Pertemuan koordinasi rujukan Kesehatan Jiwa dengan Kabupaten Kota

- : 1 keg; Jumlah Outbond Keswara : 1 keg. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (29) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.328.519.100,- atau setara dengan 66,57%. Output kegiatan adalah Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat jalan sebanyak 17.500 jiwa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (30) Kegiatan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.675.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.199.513.302,- atau setara dengan 99,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi RS Jampangkulon sebanyak 58 Orang. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (31) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.197.809.584,- atau setara dengan 61,32%. Output kegiatan adalah Alat kedokteran umum, alat kedokteran radiologi, alat rehabilitasi medik, alat kedokteran gigi, alat kedokteran THT, alat kedokteran mata, alat kedokteran bedah, alat kedokteran anak, alat kedokteran kebidanan dan kandungan, alat kedokteran penyakit kulit dan kelamin, alat kedokteran kardiologi, alat kedokteran neurologi, alat laboratorium kedokteran. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (32) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.764.278.976,- dan realisasi sebesar Rp. 25.292.248.443,- atau setara dengan 47,04%. Output kegiatan adalah Selesaiannya pembangunan gedung D, F dan G yang berfungsi sebagai ruang perkantoran, gizi dan haemodialisa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (33) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.064.023.705,- dan realisasi

sebesar Rp. 6.629.635.805,- atau setara dengan 82,21%. Output kegiatan adalah Mesin fotocopy portable, mesin penghancur kertas, cctv, mesin antrian, tabung APR, cassette mamografi, dvd external, almari arsip, almari alat dan bahan, almari bahan berbahaya, almari pakaian petugas, filling kabinet 4 laci, AC, 1, PK, 1, 5 PK, 2 PK Penunjuk Arat, Trolley alat medis, Troli pengangkut, Televisi, Braket Tv Vacuum Cleaner. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (34) Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan RS Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.367.815.175,- dan realisasi sebesar Rp. 951.527.544,- atau setara dengan 67,57%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan pengadaan tanah RSUD Kesehatan Kerja; Jumlah Dokumen Hasil Kajian Survey Pemetaan Layanan Kesehatan; Jumlah Dokumen Perijinan Jumlah Draft Dokumen penyusunan BLUD; Jumlah Pembuatan Media Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan Kerja. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (35) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 818.354.842,- atau setara dengan 58,45%. Output kegiatan adalah Pengadaan diklat/in house training/ pelatihan; pengadaan workshop/kursus-kursus singkat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (36) Kegiatan Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.052.943.884,- atau setara dengan 78%. Output kegiatan adalah Peningkatan kinerja pelayanan penunjang di RSUD Kesehatan Kerja; Terpenuhi sarana Penjangan kebutuhan Rumah Sakit seperti Alat Listrik dan Elektronik, APD K3RS/Alur K3RS, Bahan Laboratorium, Jasa Uji Laboratorium/Uji Sampling(Kesehatan Lingkungan),Jasa Profesi, dan Belanja Modal/Alat; Jumlah Dokumen Pengadaan Langsung; Jumlah Dokumen Hasil Uji Sampling. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (37) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.099.999.832,- dan realisasi sebesar Rp. 14.541.856.241,- atau setara dengan 85,04%. Output kegiatan adalah Pengadaan Bahan Obat-Obatan; Pengadaan Bahan Laboratorium; Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis; Pengadaan Jasa Profesi Kesehatan dan Non Kesehatan; Pengadaan Komputer; Pengadaan Printer; Pengadaan Note Book; Pengadaan Kulkas; Pengadaan Komputer Mainframe; Pengadaan Alat-Alat Kedokteran; Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; Pengadaan Software Jadi Antivirus. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (38) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.342.950,- dan realisasi sebesar Rp. 60.822.500,- atau setara dengan 61,22%. Output kegiatan adalah Jumlah Pembuatan Media Informasi Layanan Publik RSUD Kesehatan Kerja; Jumlah Dokumen Jasa Kantor. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (39) Kegiatan Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.475.997.500,- dan realisasi sebesar Rp. 5.994.345.479,- atau setara dengan 70,72%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pekerjaan Renovasi Gedung RSUD Kesehatan Kerja; Pekerjaan Pemagaran Dan Pembuatan Lahan Parkir RSUD Kesehatan Kerja; Pengadaan Papan nama Kantor; Jumlah Dokumen Konsultan Perencanaan; Jumlah Dokumen Konsultan Pengawas; Jumlah Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (40) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 626.048.250,- dan realisasi sebesar Rp. 462.060.100,- atau setara dengan 73,81%. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Rumah Tangga/dapur pakai habis (alat pengemas); Pengadaan exhaust fan; Pengadaan Alat Dapur.

*Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (41) Kegiatan Pengadaan peralatan kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.999.762,- dan realisasi sebesar Rp. 1.149.646.650,- atau setara dengan 95,80%. Output kegiatan adalah Jumlah Kursi dan Meja Rapat, Jumlah Gudang, Jumlah Filling Kabinet, Jumlah Dok Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (42) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.775.460.402,- dan realisasi sebesar Rp. 1.080.745.500,- atau setara dengan 60,87%. Output kegiatan adalah jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Filling; Jumlah gudang; Jumlah kendaraan bermotor; Jumlah alat studio; Jumlah Infokus; Jumlah Kursi dan meja rapat; jumlah melakukan perjalanan dinas; Jumlah peserta mengikuti rapat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (43) Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 191.171.379,- atau setara dengan 95,59%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Bulanan; Jumlah Dokumen Laporan Triwulan; Jumlah Dokumen Laporan Semester; Jumlah Dokumen Laporan Tahunan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (44) Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 48.465.000,- atau setara dengan 48,47%. Output kegiatan adalah Penyuluhan bersama Faskes Pratama di wilayah kerja RSUD Pameungpeuk sebanyak 16 Kecamatan; Promosi Pelayanan media cetak dan elektronik; Website Rumah Sakit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (45) Kegiatan Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 146.679.833,-

- atau setara dengan 73,34%. Output kegiatan adalah 175 Orang 275 Orang 275 Orang 10020 Lembar 195 kali/media 10 kali. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (46) Kegiatan Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 122.175.500,- atau setara dengan 91,59%. Output kegiatan adalah Mewujudkan sinergitas dengan Instansi Pemberi Pelayanan Kesehatan ( PPK ) lain dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (47) Kegiatan Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 130.222.907,- atau setara dengan 86,82%. Output kegiatan adalah jumlah pelayanan asuhan medis sesuai dengan standar jumlah pelayanan asuhan Keperawatan sesuai dengan standar Jumlah peserta mengikuti seminar Kedokteran Jumlah peserta mengikuti seminar Keperawatan Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training mutu keselamatan pasien Jumlah Peserta mengikuti rapat komite. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (48) Kegiatan Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 130.788.750,- atau setara dengan 65,39%. Output kegiatan adalah Jumlah Pertemuan dengan Dinas Kesehatan sewilayah III Cirebon Jumlah tenaga Rumah sakit yang mengikuti seminar TB Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang mengikuti seminar HIV. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (49) Kegiatan Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 291.862.500,- dan realisasi sebesar Rp. 270.127.000,- atau setara dengan 92,55%. Output kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan Jumlah Perawat memiliki sertifikat PPGD/BTCLS Jumlah Narasumber Jumlah Jam narasumber memberikan materi Jumlah melakukan rapat Jumlah

Peserta Inhouse training dilaksanakan Jumlah Kit Pelatihan Jumlah Tenaga perawat Pasien PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS melakukan pendampingan pasien dirujuk. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (50) Kegiatan Akreditasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.999.880,- dan realisasi sebesar Rp. 195.009.789,- atau setara dengan 65%. Output kegiatan adalah Jumlah Peserta mengikuti Workshop SNARS Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan SNARS Jumlah Peserta mengikuti Survei Simulasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti Survei verifikasi SNARS Jumlah Peserta mengikuti SISMADAK KARS Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (51) Kegiatan Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.842.725.600,- atau setara dengan 59,05%. Output kegiatan adalah Peningkatan layanan perawatan pasien masyarakat miskin di RS Paru. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (52) Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RS Parudengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.083.335.000,- dan realisasi sebesar Rp. 862.695.273,- atau setara dengan 79,63%. Output kegiatan adalah jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa Jumlah Alat kedokteran umum. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (53) Kegiatan Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.852.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.134.312.500,- atau setara dengan 87,72%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (54) Kegiatan Penyediaan media informasi RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.812.500,- dan realisasi sebesar Rp. 80.250.000,- atau setara dengan 96,91%. Output kegiatan adalah Tidak terdapat kendala yang berarti di dalam pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (55) Kegiatan Penyediaan perlengkapan pasien RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.711.424.830,- dan realisasi sebesar Rp. 1.397.577.181,- atau setara dengan 81,66%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (56) Kegiatan Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 308.317.518,- atau setara dengan 90,92%. Output kegiatan adalah Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah; Hasil Uji Lab/Sampling; Pembuangan sampah medis dan non medis. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (57) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.896.318.800,- atau setara dengan 97,41%. Output kegiatan adalah Pelayanan Pasien Rawat Inap; Pelayanan Pasien Rawat Jalan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (58) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.377.850.788,- dan realisasi sebesar Rp. 5.919.702.256,- atau setara dengan 92,82%. Output kegiatan adalah Adanya Obat Dental/Gigi Adanya Reagen Laboratorium; Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi; Adanya Obat-Obatan; Adanya Bahan Medis Habis Paka. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (59) Kegiatan Pembangunan Masjid di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.328.626.608,- dan realisasi sebesar Rp.

- 2.547.212.380,- atau setara dengan 47,80%. Output kegiatan adalah Masjid; Dokumen Review DED; Dokumen Pengawasan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (60) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.404.963.198,- dan realisasi sebesar Rp. 14.501.810.145,- atau setara dengan 94,14%. Output kegiatan adalah Tersedianya peralatan sarana dan prasarana kantor; Tersedianya peralatan mebel; Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan; tersedianya sarana dan prasarana Laboatorium; tersedianya Alat Generator Oxygen. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (61) Kegiatan Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.399.211.248,- dan realisasi sebesar Rp. 86.213.106.179,- atau setara dengan 85,02%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (62) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.369.340.089,- dan realisasi sebesar Rp. 45.051.331.587,- atau setara dengan 91,25%. Output kegiatan adalah Tersedianya Sumber Daya Rumah Sakit yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (63) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.962.789.505,- dan realisasi sebesar Rp. 22.296.014.859,- atau setara dengan 45,59%. Output kegiatan adalah Belanja Makanan dan Minuman Pasien Bulan Januari- Oktober 2019; Jumlah Belanja Makan Minum Petugas Piket Jaga Bulan Januari s.d Oktober; Jumlah Belanja Gas LPG Honorarium Tenaga BLUD; Jumlah bahan Terapi Bulan Januari; Jumlah Februari; Jumlah Maret; Jumlah April; Jumlah Mei; Jumlah Juni; Jumlah Juli; Jumlah Agustus;

Jumlah September; Jumlah Oktober 2019; Jumlah Belanja Pembinaan Jiwa Korsa; Jumlah Belanja Bahan Bangunan; Jumlah Belanja Alat listrik dan Elektronik; Jumlah Belanja Air; Jumlah listrik; Jumlah telepon dan internet; Jumlah Belanja Pakaian Batik Tenaga BLUD; Jumlah Belanja MCU Petugas beresiko; Jumlah Belanja Pengangkutan sampah; Jumlah Belanja Kasur; Jumlah Belanja modal (Laptop). *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (64) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.173.848.016,- dan realisasi sebesar Rp. 11.436.962.838,- atau setara dengan 86,82%. Output kegiatan adalah Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Secara Paripurna. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (65) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.432.042.622,- dan realisasi sebesar Rp. 18.636.170.075,- atau setara dengan 95,90%. Output kegiatan adalah Masyarakat Jabar Selatan yang Terinformasikan Pelayanan Kesehatan dan Informasi Kesehatan; Terpenuhinya kebutuhan layanan yang memerlukan Obat; Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Dental/Gigi dan Reagen Laboratorium, labu darah. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (66) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.985.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 232.128.070.956,- atau setara dengan 86,94%. Output kegiatan adalah Operasional administrasi pelayanan kesehatan; Operasional Belanja Pegawai dan Jasa Pelayanan RSUD Al Ihsan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (67) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK-Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.623.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.433.630.172,- atau setara dengan 67,17%. Output kegiatan adalah Meningkatnya realisasi Anggaran DAK Non Fisik

- Tahun 2018 di 27 Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran DAK Non Fisik dapat dilaksanakan; Dokumen Perencanaan BOK Provinsi Jawa Barat; Kesepakatan Upaya Pencapaian Anggaran BOK di 5 Wilayah; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Layanan Manajemen Kesehatan
- (68) Kegiatan Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.354.547.515,- dan realisasi sebesar Rp. 1.879.461.000,- atau setara dengan 64,50%. Output kegiatan adalah Terbangunnya Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (69) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Al Ihsan (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.560.454.494,- dan realisasi sebesar Rp. 8.987.561.518,- atau setara dengan 77,74%. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Kesehatan sebanyak 37 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (70) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Jiwa (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.828.041.720,- dan realisasi sebesar Rp. 3.619.863.299,- atau setara dengan 94,56%. Output kegiatan adalah Ambulance 3 unit; Jumlah Instalasi Pengolah Limbah Non Incenerator. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (71) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RS Paru (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.545.580.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.941.588.000,- atau setara dengan 82,96%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD RS Paru Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (72) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Jampangkulon (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.707.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.231.684.460,- atau setara dengan 95,10%. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Kedokteran Umum 7 Unit; Jumlah Pengadaan Alat kedokteran Mata 12 Unit; Jumlah Pengadaan

alat kedokteran Bedah 6 Unit; Jumlah Pengadaan alat kedokteran Anak 1 Unit; Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Obgyn 4 Unit; Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 1 Unit; Jumlah Pengadaan Ambulance Jenazah 1 Unit; Jumlah Pengadaan Kendaraan Pengangkut Limbah B3 Medis 1 Unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- (73) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Pameungpeuk (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.966.766.887,- dan realisasi sebesar Rp. 10.808.338.751,- atau setara dengan 77,39%. Output kegiatan adalah jumlah tempat tidur pasien; jumlah alat – alat kedokteran umum; jumlah alat – alat kedokteran bedah; jumlah alat – alat kedokteran anak; jumlah alat – alat laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (74) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 623.808.750,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Output kegiatan adalah Tidak dilaksanakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- (75) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan UPT Labkes (DBHCHT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.295.589.802,- dan realisasi sebesar Rp. 11.900.039.994,- atau setara dengan 47,04%. Output kegiatan adalah 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan Pakai Habis; 1 (satu) Dokumen Laporan Belanja Bahan Laboratorium; 1 (Satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor; 1 (Satu) Dokumen Laporan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

**i. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan**

Capaian indikator kinerja Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan sebagai berikut  
Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Prov

Jawa Barat Alokasi anggaran Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp. 4.046.482.422,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.053.882.184,- setara dengan 50,76%.

- (1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.770.000,- dan realisasi sebesar Rp. 743.601.950,- atau setara dengan 85,10%. Output kegiatan adalah Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas Rumah Sakit. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.306.731.374,- dan realisasi sebesar Rp. 796.360.661,- atau setara dengan 34,52%. Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pengadaan langsung; Jumlah Tenaga Pembantu Teknis Penyusunan Perencanaan; jumlah kab/kota yang terfasilitasi penyusunan perencanaan tahun 2020; Jumlah Kepala Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi Dinkes Provinsi; Jumlah orang melaksanakan perjalan ke luar provinsi; Jumlah tenaga teknis yg terbayar honorarium; Jumlah Kab/kota yang terverifikasi usulannya; Menghadiri undangan pertemuan; Jumlah KPA, PPK, PPTK dan Perencana Bidang/UPTD mengikuti pertemuan koordinasi perencanaan. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kesehatan
- (3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.499.643,- dan realisasi sebesar Rp. 79.006.200,- atau setara dengan 41,26%. Output kegiatan adalah Jumlah kab/kota yang terverifikasi usulan kegiatan; Jumlah perencana dinkes dan RSUD kab/kota yang melaporkan kegiatan *Outcome* kegiatan adalah Jumlah

Dokumen Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019.

- (4) Kegiatan Rapat-rapat dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.910.144,- atau setara dengan 44,61%. Output kegiatan adalah Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes mengikuti rapat; Dokumen LKPJ; Dokumen Renstra Kabid dan kasie; Pembinaan dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- (5) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.887.500,- dan realisasi sebesar Rp. 128.814.992,- atau setara dengan 62,57%. Output kegiatan adalah Dokumen laporan capaian kinerja; Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019; Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019; Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- (6) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.993.905,- dan realisasi sebesar Rp. 253.188.237,- atau setara dengan 72,34%. Output kegiatan adalah dokumen laporan bulanan keuangan. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan**  
Capaian indikator kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat Alokasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp. 78.843.843.753,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.594.348.331,- setara dengan 95,88%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.060.765.587,- dan realisasi sebesar Rp. 2.775.680.836,- atau setara dengan 90,69%. Output kegiatan adalah Jumlah pengadaan dan instalasi water heate;Jumlah pengadaan setrika uap dan meja setrika; Jumlah pengadaan komputer P; Jumlah pengadaan noteboo; Jumlah pengadaan printe; Jumlah pengadaan pengadaan stabilizer; Jumlah pengadaan sarpras internet; Jumlah pengadaan meja rapa; Jumlah pengadaan kursi kerja; Jumlah pengadaan kursi rapa; Jumlah alat tulis kantor penunjang pengadaan barang dan jasa;Jumlah pengadaan sofa; Jumlah pengadaan kulkas;Jumlah pengadaan dan instalasi CCT;Jumlah pengadaan proyektor;Jumlah pengadaan megaphon;Jumlah pengadaan handy talki;Jumlah pengadaan interior dinding gran;Jumlah pengadaan buku perpustakaan;Jumlah software Ms. Office;Jumlah penggandaan dokumen pengadaan barang dan jasa;Jumlah konsultan perencanaan desain interior;Jumlah konsultan pengawasan desain interior;Jumlah pengadaan penghancur kertas;Jumlah pengadaan visual elektroni;Jumlah pengadaan almari;Jumlah pengadaan alat pendingin ruangan; Jumlah pengadaan papan nama OPD. *Outcome* kegiatan adalah Peresentase Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pelatian Kesehatan.
- (2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Labororium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.073.653.323,- dan realisasi sebesar Rp. 13.170.607.274,- atau setara dengan 93,58%. Output kegiatan adalah tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS dan Non PNS; Jasa Konsultasi Perencanaan; Jasa Konsultasi Management / Keuangan / SDM;Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Labororium; tersedianya Reagen; Pengemasan/Packing barang Uji Profisiensi; Jasa Profesi Pembuatan Labororium Information System; Jasa Profesi Radiologi; Jasa Pencucian Pakaian / Alat Kesenian & Budaya / Rumah Tangga; Tersedianya Makan & Minum; Belanja Pakaian Batik Tradisional.

*Outcome* kegiatan adalah Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru.

- (3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 509.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 424.284.280,- atau setara dengan 83,73%. Output kegiatan adalah Tersedianya Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan; Tersedianya Alat Bengkel; Tersedianya Peralatan Kantor; Tersedianya Perlengkapan Kantor; Tersedianya Komputer; Tersedianya Pengadaan Mebeulair; Tersedianya Peralatan Dapur; Tersedianya Penghias Ruangan Rumah Tangga; Tersedianya Alat-alat Studio; Tersedianya Alat Alat Komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- (4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.363.191.150,- dan realisasi sebesar Rp. 4.229.798.835,- atau setara dengan 96,94%. Output kegiatan adalah jumlah kegiatan penambahan daya listrik gedung baru; jumlah kegiatan penataan ulang ruang lobby / ruang tamu; jumlah kegiatan konsultan perencana penataan ulang ruang lobby/ ruang tamu; jumlah kegiatan konsultan pengawas penataan ulang ruang lobby/ ruang tamu; jumlah kegiatan pengadaan kursi kantor; jumlah kegiatan pengadaan kelengkapan/ accessories komputer; jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat kedokteran.; jumlah kegiatan pengadaan alat rumah tangga / dapur habis pakai; jumlah pengadaan mesin penghancur kertas; jumlah pengadaan almari; jumlah pengadaan proyektor; jumlah pengadaan sound system; jumlah kegiatan pengadaan alat alat peraga/ praktik sekolah; jumlah kegiatan pemindahan beban daya listrik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- (5) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Lantai III Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.631.403.763,- dan realisasi sebesar

Rp. 6.122.989.678,- atau setara dengan 80,23%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah makan dan minum rapat pembangunan Lt III gedung serbaguna/masjid; jumlah paket perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pembangunan lt III gedung serbaguna/masjid kantor; jumlah tenaga konsultan perencanaan dan pengawasan berkala lanjutan pembangunan lt III gedung serbaguna/ mesjid kantor dinas kesehatan provinsi jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; jumlah tenaga konsultan pengawas lanjutan pembangunan lt III gedung serbaguna/ mesjid kantor dinas kesehatan provinsi jabar yang mendapat pembayaran jasa konsultan; jumlah paket kegiatan pengadaan kontruksi /pembelian bangunan; jumlah kegiatan pengadaan kontruksi air bersih. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat.

- (6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.598.510.045,- dan realisasi sebesar Rp. 6.504.651.625,- atau setara dengan 98,58%. Output kegiatan adalah Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase BOR.
- (7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.915.944.305,- dan realisasi sebesar Rp. 4.915.944.305,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah pasien yang terlayani pemeriksaan kesehatannya di RSUD Pameungpeuk. *Outcome* kegiatan adalah Persentase BOR.
- (8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.188.400,- dan realisasi sebesar Rp. 501.188.400,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Ambulance Transport, Ambulance Emergency, Bed Elektrik, Genset, Pengolah sampah Medis, Notebook/ Laptop, Ventilator, Oxigent Concentrat, Tempat tidur Elektrik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase BOR.

- (9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.304.662.632,- dan realisasi sebesar Rp. 4.265.662.632,- atau setara dengan 99,09%. Output kegiatan adalah Peningkatan alat-alat kesehatan dan prasarana di RS Paru Provinsi Jawa Barat. *Outcome* kegiatan adalah Persentase BOR.
- (10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.982.465.348,- dan realisasi sebesar Rp. 31.955.465.348,- atau setara dengan 99,92%. Output kegiatan adalah Pengadaan Alat Kesehatan sebanyak 18 unit. *Outcome* kegiatan adalah Persentase BOR.
- (11) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana di UPTD Pelatihan Kesehatan (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 502.582.700,- dan realisasi sebesar Rp. 502.582.700,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan adalah Jumlah peralatan media; Jumlah peralatan laboratorium kebidanan; jumlah Peralatan Laboratorium; Jumlah peralatan Akupresur; Jumlah peralatan alat peraga gawat darurat; Jumlah KIT Keperawatan Kesehatan Masyarakat; Jumlah Peralatan Proses Belajar Mengajar; Jumlah Peralatan Laboratorium Praktek Meramu Obat Tradisional. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTS Pelatihan Kesehatan.
- (12) Kegiatan Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan (DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 399.976.500,- dan realisasi sebesar Rp. 225.492.418,- atau setara dengan 56,38%. Output kegiatan adalah Meningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kepuasan Pelanggan.

**k. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan**

Capaian indikator kinerja Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan sebagai berikut Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat Alokasi anggaran Program Program

Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan adalah sebesar Rp. 133.641.137.466,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.934.072.689,- setara dengan 85,25%.

- (1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.525.000,- dan realisasi sebesar Rp. 187.753.800,- atau setara dengan 87,11%. Output kegiatan adalah Terselenggaranya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur, tersedianya pakaian dinas dan atribut pegawai, penyediaan pakaian kerja Non PNS, terfasilitasinya perjalanan dinas , terfasilitasinya kursus/pelatihan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di UPTD Pelatihan Kesehatan.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.051.670.663,- dan realisasi sebesar Rp. 958.061.686,- atau setara dengan 91,09%. Output kegiatan adalah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih habis pakai, penyediaan peralatan pemadam kebakaran habis pakai, pemeliharaan lift, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan bangunan air, pemeliharaan instalasi jaringan, pemeliharaan halaman/taman.tanaman, mpemeliharaan bangunan bukan kantor. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 110.624.213,- atau setara dengan 76,68%. Output kegiatan adalah Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas , perpanjangan STNK Kendaraan Operasional, terawatnya kendaraan dinas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 202.293.265,- atau setara dengan 85,17%.

- Output kegiatan adalah Tersedianya alat listrik dan elektronik serta alat-alat rumah tangga/dapur pakai habis, Terpeliharanya komputer, printer, AC, alat studio dan komunikasi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana.
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.102.419.341,- dan realisasi sebesar Rp. 2.019.668.632,- atau setara dengan 96,06%. Output kegiatan adalah Tersedianya langganan telepon, langganan air, langganan listrik, langganan surat kabar/majalah, jasa kawat/faximili/internet, jasa paket/pengiriman surat, jasa pengangkutan sampah, jasa penyedotan tinja, jasa kebersihan, jasa keamanan, langganan TV berbayar, jasa tenaga kerja kontrak Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (6) Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 135.548.700,- atau setara dengan 94,13%. Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman piket/jaga, rapat, tamu, dan lembur, Terfasilitasinya perjalanan dinas PNS Provinsi, Terfasilitasinya perjalanan dinas Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data.
- (7) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.237.972,- dan realisasi sebesar Rp. 63.158.143,- atau setara dengan 99,87%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan pakai habis penunjang pelayanan administrasi, Tersedianya biaya cetak dan penggandaan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran
- (8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.949.413.393,- dan realisasi sebesar Rp. 10.371.051.204,- atau setara dengan 94,71%. Output kegiatan adalah Tersedianya Kursus Singkat/Pelatihan, tersedianya Jasa Konsultan/Narasumber. *Outcome*

- kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.
- (9) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.636.721,- dan realisasi sebesar Rp. 527.219.600,- atau setara dengan 95,22%. Output kegiatan adalah Pemenuhan bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran, terkalibrasinya Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran, Pemenuhan etiket pemeliharaan alat, Pemenuhan pemeliharaan alat laboratorium laik pakai sesuai kebutuhan dan standar, Pemenuhan pemeliharaan alat laboratorium laik pakai sesuai kebutuhan dan standar. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana
- (10) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.796.752,- dan realisasi sebesar Rp. 152.632.590,- atau setara dengan 83,49%. Output kegiatan adalah Jumlah Perawat mengikuti penyegaran manajemen cairan dan oksigen, Jumlah perawat yang mendapat penyegaran Hipno terapi, Jumlah Perawat mengikuti penyegaran penyegaran PANSS-EC, jumlah perawat yang mengikuti penyegaran evidence based nursing, Jumlah perawat yang mengikuti penyegaran pelaksanaan pencegahan terjadinya infeksi, Jumlah perawat yang mengikuti penyegaran mutu profesi keperawatan, Jumlah perawat yang mendapat kewenangan klinis, Pelaksanaan manajemen keperawatan yang professional. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.
- (11) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.496.768.676,- dan realisasi sebesar Rp. 1.245.536.494,- atau setara dengan 83,21%. Output kegiatan adalah Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan Pembentukan Tim Bencana; Penyegaran ASKEP Dasar Jiwa; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan Penguatan Perawat Intensif Psikiatri; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Penanggulangan TB-HIV di RSJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Nyeri ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPI; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Musik Tradisional; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Sosial Skill Training; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus Sosial ODGJ; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan SP2KP; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Preceptorship; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Komunikasi Efektif; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan PPDG; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan BTCL; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan ACLS; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Konseling Adiksi; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Diagnosis Coding; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Kredensial Tenaga Kesehatan Lain; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse training; Jumlah SDM mendapatkan pelatihan pengelolaan Keuangan melalui inhouse training; Jumlah SDM Kesehatan dan non kesetanan dapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan eksternal. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

- (12) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 179.071.374,- atau setara dengan 89,53%. Output kegiatan adalah Ketepatan waktu Laporan keuangan, laporan kinerja pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev Scorecard, Atisibada pelaporan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja
- (13) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 992.151.000,- dan realisasi sebesar Rp. 931.789.200,- atau setara dengan 93,91%. Output kegiatan adalah Tersedianya Pengisi acara halal bi halal, Sewa gedung olahraga, Sewa kostum, Snack pengajian rutin, Pakaian dinas

harian, Pakaian seragam batik, Pakaian olah raga peserta Porpemprov, Perjalanan dinas peserta Porpemprov, Pembinaan jiwa korsa (dua gelombang);1. Penceramah agama,Instruktur baca Alquran, Instruktur senam, Instruktur kesenian, Instruktur bulutangkis, Instruktur beladiri, Instruktur tenis meja, Instruktur futsal, Penceramah acara halal bi halal. *Outcome* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.

- (14) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional aparat RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 701.647.450,- dan realisasi sebesar Rp. 391.854.745,- atau setara dengan 55,84%. Output kegiatan adalah Tersedianya Bahan bakar Minyak/Gas, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan KIR kendaraan dinas sudah dilakukan perpanjangan, tersedianya Service dan pelumas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (15) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 852.714.000,- dan realisasi sebesar Rp. 623.191.502,- atau setara dengan 94,13%. Output kegiatan adalah Pemeliharaan AC; Pemeliharaan Alat Kesenian; pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik; Pemeliharaan CCTV; Pemeliharaan Depot Air dan Instalasi; Pemeliharaan Jaringan Air Bersih; Pemeliharaan Komputer;Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Lif; Pemeliharaan Mesin Antrian Pasien; Pemeliharaan Mesin Cuc; Pemeliharaan Mesin Fax; Pemeliharaan Mesin Genzet/Panel Listrik; Pemeliharaan Mesin Photo Copy; Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Mesin Rumput; Pemeliharaan PABX; Pemeliharaan Printer; Pemeliharaan Setrika; Pemeliharaan Sound System; Pemeliharaan Sumur Artesis; Pemeliharaan Torn dan Instalasi; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Pembersih. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

- (16) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.052.776,- dan realisasi sebesar Rp. 5.890.395.920,- atau setara dengan 98,56%. Output kegiatan adalah Tersedianya ATK, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Jasa kebersihan, Jasa Keamanan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (17) Kegiatan Pemeliharaan/rehab bangunan kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.914.696.910,- dan realisasi sebesar Rp. 4.999.096.059,- atau setara dengan 72,29%. Output kegiatan adalah Peningkatan Bangunan Pos Jaga Rumah Sakit Jiwa, Pembangunan Jalan, Pembangunan Selasar Rumah Sakit Jiwa, Pemeliharaan Gedung Pelayanan, Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Kasuari, Pemeliharaan Rumah Dinas Pegawai Rumah Sakit Jiwa, Peningkatan Bangunan Genset Rumah Sakit Jiwa, pemeliharaan Gedung Kantor RS Jiwa, Pembangunan Jalan Hotmix lebar 5 meter. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (18) Kegiatan Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404.570.000,- dan realisasi sebesar Rp. 223.056.968,- atau setara dengan 55,13%. Output kegiatan adalah Perizinan tempat pembuangan sampah medis; Jasa Giro/jasa transfer dan Cek; Jasa Dokumentasi publikasi/yellow page/surat kabar dan spanduk; Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health Promotion Hospital; Jasa Profesi Supir; Surat Kabar; Surat; Sertifikasi/ Perizinan pengangkal petir; Sertifikasi/Perizinan IMB; Perizinan Hydrant; Perizinan penggunaan sumber daya air; Sertifikasi uji Genset; Perizinan SIPA Artesis. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 802.813.000,- dan realisasi sebesar Rp. 704.546.370,- atau setara dengan 87,75%. Output kegiatan adalah Tersedianya ATK; Materai @ Rp. 6000; Materai @ Rp. 3000; langganan majalah kesehatan; Cetakan undangan Halal Bihalal; Cetakan administrasi medis dan perkantoran; Fotocopy Dokumen; Penjilidan;

- Belanja buku kesehatan/ manajemen/ penelitian/ hukum/ tata kelola/ jurnal/ Pendidikan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (20) Kegiatan Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat dan koordinasi RS Jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 997.195.659,- atau setara dengan 82,68%. Output kegiatan adalah Tersedianya Makan dan minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja Air dalam Kemasan; Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi/ konsultasi serta menghadiri rapat/ pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi; Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa Sound System; Makan dan Minum tamu undangan halal bihalal (prasmanan); Snack Halal Bihalal; Penyediaan makan dan minum rapat kedinasan/kegiatan; snack rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan minum tamu; Snack tamu. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (21) Kegiatan Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 531.638.800,- dan realisasi sebesar Rp. 514.529.853,- atau setara dengan 96,78%. Output kegiatan adalah Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; Jumlah pegawai yang divaksinasi dan menerima makanan penambah daya tahan tubuh; Jumlah pakaian aparatur. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (22) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 95.495.000,- atau setara dengan 91,51%. Output kegiatan adalah Penyediaan kursus / pelatihan singkat, penyediaan makan dan minum. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.
- (23) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.797.998,- dan realisasi sebesar Rp. 407.102.606,- atau setara

- dengan 92,43%. Output kegiatan adalah Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor UPTD Labkes. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (24) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.317.300,- dan realisasi sebesar Rp. 65.703.989,- atau setara dengan 80,79%. Output kegiatan adalah Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dengan baik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (25) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 822.984.250,- dan realisasi sebesar Rp. 774.114.812,- atau setara dengan 94,06%. Output kegiatan adalah Terpeliharanya Bangunan gedung kantor, halaman, pekerjaan konstruksi pemeliharaan Gedung. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (26) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 177.052.462,- dan realisasi sebesar Rp. 162.085.401,- atau setara dengan 91,54%. Output kegiatan adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi, tersedianya perjalanan dinas dalam mendukung tupoksi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (27) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 334.827.517,- dan realisasi sebesar Rp. 293.725.815,- atau setara dengan 87,72%. Output kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan dan ATK. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (28) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.146.972,- dan realisasi sebesar Rp. 1.642.082.120,- atau setara dengan 96,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya jasa keamanan

- kantor, Tersedianya jasa kebersihan kantor, Jumlah jasa kantor; tersedianya alat listrik/ elektronik; pembayaran honorarium tenaga dokter radiologi, terpenuhinya kebutuhan tenaga, tenaga front office, tenaga pengemudi; tersedianya Pengiriman kilat khusus Belanja transaksi keuangan Minuman pasien. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (29) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 880.953.117,- dan realisasi sebesar Rp. 854.386.617,- atau setara dengan 96,98%. Output kegiatan adalah Tersedianya alat listrik/ elektronik; tersedianya gas; tersedianya langganan telepon; tersedianya langganan air; tersedianya langganan listrik; tersedianya langganan surat kabar/majalah; tersedianya langganan internet Pengiriman kilat khusus; tersedianya transaksi keuangan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (30) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 90.413.050,- atau setara dengan 90,41%. Output kegiatan adalah Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (31) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor RSUD Jampangkulon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 905.015.909,- atau setara dengan 60,33%. Output kegiatan adalah Tersedianya Jasa Telepon; Tersedianya Jasa Air Bersih; Tersedianya JasaListrik; Tersedianya Jasa Internet. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (32) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 147.553.467,- atau setara dengan 79,75%. Output kegiatan adalah Penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, perpanjangan Pajak Kendaraan

- bermotor. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (33) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.543.317.426,- dan realisasi sebesar Rp. 1.341.996.430,- atau setara dengan 86,95%. Output kegiatan adalah Penyediaan jasa kebersihan, Penyediaan Jasa Keamanan, Pemeliharaan instalasi jaringan, Iuran Wajib tahunan Evaluasi TLD Radiologi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (34) Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.419.950,- dan realisasi sebesar Rp. 331.452.183,- atau setara dengan 78,46%. Output kegiatan adalah Penyediaan makan dan minum rapat, , Koordinasi dan implementasi tim kesehatan kerja, rapat-rapat dan koordinasi manajemen, penyediaan air mineral. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (35) Kegiatan Penyediaan barang dan ATK RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.999.634,- dan realisasi sebesar Rp. 219.020.815,- atau setara dengan 87,60%. Output kegiatan adalah Penyediaan ATK dan barang habis pakai. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (36) Kegiatan Penyediaan jasa kantor RSUD kesehatan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 873.096.727,- dan realisasi sebesar Rp. 685.237.238,- atau setara dengan 78,48%. Output kegiatan adalah Penyediaan langganan telepon, langgan listrik, langganan Internet, penyediaan tabung gas oksigen, langganan surat kabar, pengadaan alat listrik dan elektronik. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (37) Kegiatan peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur RSUD Kesehatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 899.990.000,- dan realisasi sebesar Rp. 783.319.968,- atau setara dengan 87,03%. Output kegiatan adalah Capacity building, pelatihan/kursus singkat,

- tersedianya sarana olah raga. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (38) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.649.309.187,- atau setara dengan 74,96%. Output kegiatan adalah tersedianya cetakan; tersedianya alat listrik dan elektronik;tersedianya Pakaian korpri; tersedianya pakaian batik;tersedianya pakaian dan sepatu olahraga;tersedianya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; trsedianya Meterai; tersedianya pemesanan karangan bunga; tersedianya surat kabar; tersedianya obyek yang dipajakkan; Jumlah pengangkutan pengapusan barang; tersedianya ATK. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (39) Kegiatan Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Parudengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.490.100.784,- atau setara dengan 99,34%. Output kegiatan adalah Tersedianya jamuan makan minum rapat; tersedianya perjalanan dinas dalam daerah ; tersedianya melakukan perjalanan dinas luar daerah. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (40) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.700.392.696,- dan realisasi sebesar Rp. 9.428.764.411,- atau setara dengan 80,58%. Output kegiatan adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya;tersedianya Makan dan Minum Rapat; tersedianya Makan dan Minum Tamu;tersedianya Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ketersediaan data kinerja.
- (41) Kegiatan Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.807.516,- dan realisasi sebesar Rp. 2.086.577.039,- atau setara dengan 97,64%. Output kegiatan adalah Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; Jumlah Gedung Non Perawatan RSP di pelihara; Jumlah melakukan perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah konsultan gedung oleh konsultan

- perencana; Jumlah Pengawasan gedung oleh konsultan pengawas; Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (42) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 87.650.000,- atau setara dengan 59,82%. Output kegiatan adalah Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang diikuti. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi
- (43) Kegiatan Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 408.664.673,- atau setara dengan 54,48%. Output kegiatan adalah jumlah sumur artesis dipelihara; Jumlah penangkal petir dipelihara; Jumlah pengisian tabung; jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah pelumas; Jumlah alat laboratorium yang dipelihara; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara; Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah instalasi listrik dipelihara. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (44) Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 997.004.419,- atau setara dengan 79,76%. Output kegiatan adalah Jumlah perlengkapan dapur; Jumlah Megatron; Jumlah Film; jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; Jumlah Mebeuleir; Jumlah Komputer; Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Jumlah Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah TV yang disediakan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (45) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.490.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.397.991.741,- atau setara dengan 93,82%. Output kegiatan adalah Jumlah makan minum piket jaga ramadan/idul

fitri; Jumlah pakaian kerja lapangan; Jumlah pakaian dinas harian; Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga; Jumlah Perjalanan Dinas; jumlah pegawai mengikuti diklat lebih 20 jam; Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat; Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk dan Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah gedung olahraga/stand pameran yang disewa.

*Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja

- (46) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.089.247,- dan realisasi sebesar Rp. 869.538.425,- atau setara dengan 95,23%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah paket atk untuk operasional dinas kesehatan; jumlah bulan penyediaan kebutuhan benda pos; jumlah paket pekerjaan cetak; jumlah bulan penyediaan biaya foto copy. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja
- (47) Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610.490.000,- dan realisasi sebesar Rp. 493.900.000,- atau setara dengan 80,90%. Output kegiatan adalah 1. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 2. jumlah asn dinkes menpatakan uang saku diklat; 3. jumlah tenaga ahli / pakar mendapatkan honorarium narasumber; 4. jumlah asn dinkes mampu membangun dan menanamkan jiwa kemandirian, kebersamaan, disiplin, dan meningkatkan motivasi kerja; 5. jumlah asn dinkes mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, manajerial, fungsional dan pemerintahan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi.
- (48) Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.709.570.200,- dan realisasi sebesar Rp. 3.221.448.367,- atau setara dengan 86,84%. Output kegiatan adalah 1. jumlah bulan penyediaan

- biaya makanan dan minuman rapat kedinasan, tamu kedinasan, dan petugas SPGDT;2. jumlah penyediaan jasa akomodasi rapat rapat koordinasi;3. jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dalam daerah PNS dan Non PNS dinas kesehatan;jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja
- (49) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.830.000,- dan realisasi sebesar Rp. 537.172.500,- atau setara dengan 94,10%. Output kegiatan adalah 1. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium;2. jumlah instruktur senam dan kebugaran, khotib jumat, siraman rohani, qori, saritilawah mendapatkan honor jasa profesi;3. jumlah lapangan olahraga yang disewa;4. jumlah ASN dinas kesehatan prov jabar mendapat pakaian seragam putih biru;5. jumlah ASN dinas kesehatan prov jabar mendapat pakaian seragam olahraga. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja
- (50) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.030.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.237.662.822,- atau setara dengan 80,33%. Output kegiatan adalah 1. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium;2. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan gedung kantor;3. jumlah kegiatan penyedotan septictank;4. jumlah bulan penyediaan jasa keamanan kantor;5. jumlah paket kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor dinas kesehatan;6. jumlah kegiatan pemeliharaan taman/ tanaman hias. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (51) Kegiatan Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.826.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.445.796.654,- atau setara dengan 86,53%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kebakaran; presentasi pendokumentasian kegiatan kedinasan; jumlah bulan penyediaan

langganan kantor; jumlah bula penyediaan biaya ucapan, iklan, reklame; jumlah tenaga teknis yang mendapat pembayaran jasa pelayanan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja

- (52) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 728.182.000,- dan realisasi sebesar Rp. 526.298.767,- atau setara dengan 72,27%. Output kegiatan adalah 1.jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional roda 4 dan roda 2;2. jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang di perpanjang STNK nya;3. jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dilakukan KIR;4. jumlah bulan kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang;5. jumlah bulan kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.
- (53) Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.185.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.256.929.500,- atau setara dengan 82,55%. Output kegiatan adalah Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; Jumlah peserta rapat pengadaan tanah untuk gudang vaksin yang mendapat mamin rapat; jumlah kegiatan perjalanan dinas kegiatan koordinasi pengadaan tanah gudang vaksin dinas kesehatan; jumlah paket belanja modal pengadaan tanah untuk gudang vaksin. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Ketersediaan Data Kinerja
- (54) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.359.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 950.557.144,- atau setara dengan 69,91%. Output kegiatan adalah Sarana dan Prasarana Kantor terpelihara dengan baik sesuai fungsinya. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik.

2. Belanja Tidak Langsung (Gaji) sebesar Rp. 229.523.633.913,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.638.240.307,- (77,83%)

3. Alokasi anggaran bersumber APBN , dengan rician sebagai berikut :
  1. Anggaran Dana Dekonsentrasi (setelah revisi anggaran), sebesar Rp. 52.305.166.000,- dengan Realisasi Rp. 42.852.614.282,- (81,93%). Dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sebesar Rp. 3.409.881.000,- dengan Realisasi Rp. 2.928.771.917,- (85,89%)
    - b. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, sebesar Rp. 1.450.220.000,- dengan Realisasi Rp. 1.355.099.500,- (93,44%)
    - c. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sebesar Rp. 12.607.914.000,- dengan Realisasi Rp. 11.099.034.240,- (88,03%)
    - d. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp. 2.066.009.000,- dengan Realisasi Rp. 1.871.871.419,- (90,60%)
    - e. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebesar Rp. 25.366.598.000,- dengan Realisasi Rp. 16.982.173.550,- (66,95%)
    - f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sebesar Rp. 2.393.564.000,- dengan Realisasi Rp. 2.088.546.573,- (87,26%)
    - g. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), sebesar Rp. 4.646.073.000,- dengan Realisasi Rp. 4.332.789.643,- (93,26%)
  2. Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kabupaten/kota di 27 kab/kota dan 46 RSUD dari kab/kota, sebesar Rp. 1.937.805.221.517,- dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 164.052.218.000,- , dengan realisasi Rp. 134.284.347.183,-
    - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Pelayanan Kefarmasian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 117.464.323.000,-, dengan realisasi Rp. 109.943.304.207,-
    - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Stunting Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 61.511.667.000,-, dengan realisasi Rp. 48.680.879.947,-

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan P2P Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 88.610.564.000,- dengan realisasi Rp. 72.023.959.229,-
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bappelkes Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.216.605.000,-, dengan realisasi Rp. 502.582.700,-
- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Sekunder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 43.243.250.000,-, dengan realisasi Rp. 36.295.240.748,-
- g. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Stunting Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.500.000.000,-, dengan realisasi Rp. 8.208.060.051,-
- h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 660.660.595.000,-, dengan realisasi Rp. 543.687.324.423,-
- i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. E Logistik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.467.285.000,- dengan realisasi Rp. 3.733.016.024,-
- j. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dukman Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 36.256.000.000,-, dengan realisasi Rp. 27.263.960.667,-
- k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 111.058.846.000,- untuk 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan realisasi Rp. 91.531.326.610,-
- l. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 69.823.194.000,-, Dengan Realisasi Rp. 54.690.450.802,-
- m. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bidang Akreditasi Rumah Sakit Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.127.880.000,-, Dengan Realisasi Rp. 1.198.427.448,-

n. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Sub Bid. Akreditasi Laboratorium Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.099.325.000,-, dengan realisasi Rp. 3.290.811.881,-

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR

#### 4.1.1 SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI-SASI	% PENCAPAIAN	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83%	Sangat Baik
		Rasio Kematian Bayi	5,2/1000 KH	3,28/ 1000 KH	158,54%	Sangat Baik
		Prevalensi Stunting	27,2 %	26,21%	103,78%	Sangat Baik
		Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	75%	84,27%	Baik
		Persentase Penduduk yang berdampak Krisis kesehatan akibat bencana Provinsi yang mendapat Pelayanan	100%	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	94,76%	95,89 %	101,19%	Sangat Baik
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan layad Rawat	29,63%	44,44%	149,98%	Sangat Baik
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	59,13%	88.89 %	150,33%	Sangat Baik
		Persentase Ketersediaan Obat esensial	90%	94,33%	104,81	Sangat Baik

Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebanyak 9 indikator dengan kategori Sangat baik, dan baik, dengan perincian Penilaian sebagai berikut :

- Sangat baik ( $\geq 100\%$ ) : 8 indikator (88,89%)
  - Baik ( $\geq 80 - < 100\%$ ) : 1 indikator (11,11%)
- Jumlah : 9 indikator**

#### 4.1.2. SIMPULAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEJIK

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk di dalam Indikator sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PENILAIAN				KETERA-NGAN
			Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	13	9	4	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Simpulan Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2019 yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dengan jumlah indikator sebanyak 13 indikator dengan kategori Sangat baik, baik, dan Kurang dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- Sangat baik ( $\geq 100\%$ ) : 9 indikator ( 69,23% )
  - Baik ( $\geq 80 - < 100\%$ ) : 4 indikator ( 30,77% )
  - Cukup ( $> 55 - < 80\%$ ) : 0 indikator ( 0% )
  - Kurang ( $< 55\%$ ) : 0 indikator ( 0% )
- Jumlah : 13 indikator ( 100% )**

Capaian Indikator Sasaran Stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dengan hasil sebagai berikut :

- **Kategori : Sangat Baik** – sebanyak 9 indikator dengan capaian kinerja sebesar 69,23%
- **Kategori : Baik** – sebanyak 4 indikator dengan capaian kinerja sebesar 30,77%
- **Kategori : Cukup** – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebesar 0%
- **Kategori : Kurang** – sebanyak 0 indikator dengan capaian kinerja sebesar 0%

## 4.2 HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

### 4.2.1 Indikator Rasio Kematian Ibu dan Bayi:

Adanya tata kelola klinis yang belum maksimal, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Adapun penyebab tidak langsung dikarenakan kondisi ibu hamil anemia, Surveilans kematian ibu belum dijalankan dengan optimal, Regulasi BPJS yang kurang tepat terhadap pelayanan kasus kebidanan khususnya dimana ibu hamil yang memiliki faktor risiko/berisiko tidak bisa di rujuk langsung ke FKTL namun harus dikelola di FKTP, sementara kasus-kasus kebidanan itu dapat terjadi kegawatdaruratan kapanpun dan bila tidak segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar maka akan terjadi keterlambatan dan bisa mengakibatkan meninggal

### 4.2.2 Prevalensi Stunting

Belum optimalnya penatalaksanaan kasus gizi buruk ada kaitannya dengan kebijakan program gizi kita yang masih mengedepankan asupan pangan, makanan dan konsumsi sebagai penyebab utama masalah gizi. Kebijakan yang diluncurkan masih ada yang cenderung mengabaikan peran faktor lain sebagai penyebab timbulnya masalah gizi seperti air bersih, kebersihan lingkungan dan pelayanan kesehatan dasar

### 4.2.3 Persentase Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

- 1 Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar
- 2 Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan

- 3 Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal
- 4 Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama ke petugas baru tidak dilakukan dengan baik

#### **4.2.4 Persentase penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan**

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2019 untuk program bencana adalah tidak adanya sarana prasarana penanggulangan bencana (alat komunikasi, seragam, kendaraan operasional roda dua dan roda empat) sehingga pada saat terjadi bencana di daerah tidak bisa langsung turun ke lapangan, walaupun demikian kegiatan penanggulangan bencana ini tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana

#### **4.2.5 Persentase Puskesmas terakreditasi**

1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu standar akreditasi puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan koordinasi dengan Kemenkes terkait standar baru akreditasi puskesmas
2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas secara berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum akreditasi maupun yang sudah akreditasi

#### **4.2.6 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat**

1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui proposal kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian motor ambulance roda dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan proposal.
2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni
3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir tahun.
4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisiensi sehubungan kesiapan Kab/Kota dalam menerima kerjasama Layad Rawat

5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat ,terlaksana 4 kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.
6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada penyedia yang masuk dalam SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang bersedia untuk memberi talangan kegiatan tersebut .
7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance, tidak terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup menyelesaikan dalam waktu masa perubahan .
8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober 2019.
9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai di akhir Tahun anggaran

#### **4.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi**

Masih ada Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit untuk akreditasi

#### **4.2.8 Persentase Kesediaan Obat Esensial**

terdapat obat Program yang datang melebihi RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti obat TBC Kategori I (FDC Kat I)

#### **4.2.9 Persentase Penduduk terhadap sanitasi yang Layak (Jamban Sehat)**

Belum semua Puskesmas melaporkan data capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya

#### **4.2.10 Persentase Kabupaten Kota dengan cakupan Rumah Tangga ber PHBS >60%**

1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.
2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pemdataan PHBS Rumah Tangga.

3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama, ada yang pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan dengan cara sample atau dipantau

#### **4.2.11 Prevalensi Hipertensi**

1. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat minim
2. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan data program dan tidak rutin dilaporkan
3. Sering terjadi *turn over* dari petugas pemegang program P2PTM
4. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa Kabupaten/Kota masih sangat minim
5. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas

#### **4.2.12 Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage**

1. Adanya Peraturan - Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat FKTP maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Provinsi;
2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;
4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

### **4.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat strategi pemecahan masalah melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

#### **4.3.1 Kegiatan yang dibiayai oleh APBD**

##### **4.3.1.1 Program Pelayanan Kesehatan**

- 1) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat;
- 2) Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer

- 3) Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan
- 5) Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional
- 6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
- 7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
- 8) Pengelolaan Fasilitas Kesehatan
- 9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

#### 4.3.1.2 Program Sumber Daya Kesehatan

- 1) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes
- 2) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat
- 3) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat
- 4) Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
- 5) Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
- 6) Penguatan Jaminan Kesehatan
- 7) Penguatan Pembiayaan Kesehatan
- 8) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (Non JKN) lintas batas

#### 4.3.1.3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- (1) Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Gudang ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- (2) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar

#### 4.3.1.4 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Uptd Pelatihan Kesehatan

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan

4.3.1.5 Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi

- (1) Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra
- (2) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB

4.3.1.6 Program Kesehatan Masyarakat;

- (1) Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
- (2) Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama Haji Tahun 2019
- (3) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja
- (4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- (5) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- (6) Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir
- (7) Peningkatan Program Kesehatan Keluarga
- (8) Peningkatan Gizi Masyarakat
- (9) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga

4.3.1.7 Program Manajemen Kesehatan

- (1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik
- (2) Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan

4.3.1.8 Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan
- (2) Pengendalian penyakit menular ISPA
- (3) Pengendalian penyakit kusta
- (4) Pencegahan dan pengendalian DBD
- (5) Pengendalian penyakit malaria
- (6) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
- (7) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS
- (8) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP
- (9) Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis
- (10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar

(11) Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)

(12) Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa

4.3.1.9 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan

(1) Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

(2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)

(3) Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

10 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan

(1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan

(2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan

(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan

11. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon

(1) Pengadaan Bahan Habis Pakai medis dan penunjang medis RSUD Jampangkulon

(2) Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon

(3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon

(4) Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon

12. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA

(1) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

(2) Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)

(3) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa

(4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa

(5) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa

(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa

(7) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa

(8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa

(9) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa

(10) Akreditasi RS RS Jiwa

- (11) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa
- (12) Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Tahap II
- 13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja
  - (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
  - (2) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat)
  - (3) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja
  - (4) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja
- 14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk
  - (1) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
  - (2) Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
  - (3) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
  - (4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk
  - (5) Pengadaan ObatObatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk
- 15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru
  - (1) Penyediaan Perlengkapan Pasien
  - (2) Penyediaan media informasi RS Paru
  - (3) Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru
  - (4) Akreditasi RS Paru
  - (5) Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru
  - (6) Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Paru
  - (7) Penyelenggaraan komitekomite di RS Paru
  - (8) Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
  - (9) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru
- 16. Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan

- (1) Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
  - (2) Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan
17. Program dukungan manajemen perkantoran dinas kesehatan prov. Jawa barat
- (1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
  - (2) Penyediaan Langganan Kantor
  - (3) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - (4) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (6) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (7) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (8) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (9) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (10) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (11) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
  - (12) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2020
  - (13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (14) Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes
  - (15) Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain
  - (16) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (17) Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (18) Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (19) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (20) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

- (21) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (22) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (23) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar
  - (24) Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jabar
  - (25) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
18. Program dukungan manajemen perkantoran rs al- ihsan upt dinas kesehatan prov. Jawa barat
- (1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (2) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (3) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (5) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - (6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan
19. Program dukungan manajemen perkantoran rs jampangkulon upt dinas kesehatan prov. Jawa barat
- (1) Penyediaan Langganan Kantor
  - (2) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
  - (3) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (5) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (7) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (8) Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon
  - (9) Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur
  - (10) Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon
  - (11) Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon
  - (12) Penyediaan Jasa Outsourcing Kebersihan RS Jampangkulon
  - (13) Penyediaan Jasa Outsourcing Keamanan RS Jampangkulon

(14) Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon

20. Program dukungan manajemen perkantoran rs jiwa upt dinas kesehatan prov. Jawa barat

- (1) Penyediaan Langganan Kantor
- (2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
- (3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
- (4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
- (5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- (6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
- (7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
- (8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
- (9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
- (10) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
- (11) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa
- (12) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat
- (13) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa
- (14) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa
- (15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa
- (16) Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa
- (17) Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
- (18) Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa
- (19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa
- (20) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa
- (21) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa

21. Program dukungan manajemen perkantoran rs kesehatan kerja upt dinas kesehatan prov. Jawa barat

- (1) Penyediaan Langganan Kantor
- (2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor

- (3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - (6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
  - (8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (10) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
  - (11) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
  - (12) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi
  - (13) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
  - (14) Penyediaan Jasa Kantor
  - (15) Penyediaan Barang dan ATK
  - (16) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur
  - (17) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD Kesehatan Kerja
  - (18) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja
  - (19) Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kerjasama, dan Pemasaran RSUD Kesehatan Kerja
  - (20) Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kesehatan Kerja
22. Program dukungan manajemen perkantoran rs pameungpeuk upt dinas kesehatan prov. Jawa barat
- (1) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (2) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (3) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (4) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (6) Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
  - (7) Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk
23. Program dukungan manajemen perkantoran rs paru upt dinas kesehatan prov. Jawa barat

- (1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (2) Penyediaan Langganan Kantor
  - (3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - (6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
  - (8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (10) Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru
  - (11) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
  - (12) Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru
  - (13) Pengadaan peralatan kantor RS Paru
  - (14) Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
  - (15) Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
  - (16) Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru
  - (17) Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
  - (18) Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru
  - (19) Penyediaan Jasa Kantor RS Paru
  - (20) Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru
  - (21) Penyediaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan RS Paru
24. Program dukungan manajemen perkantoran unit laboratorium kesehatan upt dinas kesehatan prov. Jawa barat
- (1) Penyediaan Langganan Kantor
  - (2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - (6) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya

- (7) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
  - (8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (10) 'Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (11) 'Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (12) 'Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (13) 'Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (14) 'Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (15) 'Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (16) 'Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (17) 'Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (18) 'Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
  - (19) Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
25. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan Upt Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat
- (1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
  - (2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
  - (3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
  - (4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
  - (5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
  - (6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor

- (7) Penyediaan Langganan Kantor
  - (8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
  - (9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
  - (10) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (11) Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (12) Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (13) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (14) Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (15) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
  - (16) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
26. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Rs Pameungpeuk
- (1) Pembangunan Gedung PoliRanap di RSUD Pameungpeuk
  - (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
  - (3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk
  - (4) Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk
  - (5) Pembangunan Gedung Laundry
  - (6) Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk
27. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Al Ihsan
- (1) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
  - (2) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan
  - (3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Al Ihsan
28. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON
- (1) Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Jampangkulon
  - (2) Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon
  - (3) Pembangunan Landscape Tahap I RS Jampangkulon
  - (4) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon
  - (5) Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
  - (6) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon

- (7) Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Jampangkulon
  - (8) Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Jampangkulon
  - (9) Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon
  - (10) Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon
  - (11) Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Jampangkulon
29. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Jiwa
- (1) Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Medis RS Jiwa
  - (2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
  - (3) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
  - (4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa
  - (5) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa
  - (6) Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
  - (7) Pembangunan Tahap I
  - (8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa
  - (9) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa
  - (10) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Jiwa (DAK)
30. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Paru
- (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru
  - (2) Pembangunan RS Paru
  - (3) Pengadaan alatalat kesehatan RS Paru
  - (4) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor RS Paru
31. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja
- (1) Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja
  - (2) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perijinan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
  - (3) Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Layanan RSUD Kesehatan Kerja
  - (4) Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
  - (5) Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja
32. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan

- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- (2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

#### **4.3.2 Kegiatan yang dibiayai oleh APBN :**

- 1) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
- 2) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
- 3) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 4) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
- 5) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKN) /KIS
- 6) Pembinaan Gizi Masyarakat
- 7) Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi & Kes Ibu & Anak
- 8) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olah Raga
- 9) Pembinaan Kesehatan Keluarga
- 10) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 11) Penyehatan Lingkungan
- 12) Pembinaan Upaya penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
- 13) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
- 14) Pembinaan Kesehatan Rujukan
- 15) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekertariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- 16) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 17) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- 18) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
- 19) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
- 20) Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 21) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 22) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
- 23) Pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dan Napza
- 24) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

- 25) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 26) Peningkatan Produksi dan distribusi Alat Kesehatan
- 27) Dukungan Manajemen Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 28) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- 29) Pelatihan SDM Kesehatan
- 30) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- 31) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat badan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK)

=====((((( @ @ @ @ )))====